

**STRATEGI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

(Skripsi)

Oleh

**Aldi Darmawan
1916021036**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRACT

STRATEGY OF THE INDONESIAN DEMOCRACY PARTY THE STRUGGLE OF LAMPUNG PROVINCE IN THE 2024 GENERAL ELECTIONS

By

ALDI DARMAWAN

In the upcoming 2024 elections, the PDI-Perjuangan vote has decreased in Lampung Province, the decline in PDI-Perjuangan votes is due to the increase in fuel prices (BBM) and the nomination of Puan Maharani as President. This study aims to identify and describe the strategies adopted by the PDI-Perjuangan in preventing a significant decline in votes. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used in this study were interviews and documentation. This study uses the theory of the types of strategies put forward by Peter Schroder in choosing (Nursal, Adman 2004: 162) as a problemsolving analysis, the types of strategies are defensive strategies, offensive strategies, image strategies and character and institutional strategies. The results of the research found were that the Defensive Strategy was applied, there was an assignment of intimidating parties by means of recess for electoral district members and maintenance that went down directly to the community and carried out mass media by countering negative issues about the PDI-Perjuangan. The Offensive Strategy is implemented by selling a good image in the community, as well as taking humane approaches by carrying out programs that are appropriate to the conditions in the area. The image strategy implemented is by forming a cyber truck and utilizing social media for party imagery and working with Islamic mass organizations. The characterization and institutional strategy implemented by developing fighting communities and strengthening institutions, recruitment is carried out by screening and screening stages. Of the four strategies, the offensive strategy is the most dominant because it is able to create new ballots for the 2024 election and enlarge the supporters of the previous traditional masses and the character and institutional strategy is ineffective because it only takes into account vote revenue without being able to print or prepare superior cadres so they can be liked public.

Keywords: 2024 Election, Strategy, Goals, PDI-Perjuangan.

ABSTRAK

STRATEGI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Oleh

ALDI DARMAWAN

Pada Pemilu tahun 2024 mendatang, suara PDI-Perjuangan mengalami penurunan di Provinsi Lampung, menurunnya suara PDI-Perjuangan disebabkan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pencalonan Puan Maharani sebagai Presiden. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi yang diterapkan PDI-Perjuangan dalam mencegah penurunan suara yang signifikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori tipe-tipe strategi yang dikemukakan Peter Schroder dalam memilih (Nursal, Adman 2004:162) sebagai analisis pemecahan masalah, jenis-jenis strateginya yaitu, strategi defensif, strategi ofensif, strategi pencitraan dan strategi ketokohan dan kelembagaan.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah Strategi Defensif yang diterapkan terdapat penugasan partai memintim dengan cara reses anggota dapil dan pemeliharaan yang turun langsung kemasyarakat serta melakukan dimedia massa dengan mengcounter isu-isu negatif tentang PDI-Perjuangan. Strategi Ofensif yang diterapkan dengan trik menjual image yang baik dimasyarakat, serta melakukan pendekatan-pendekatan yang humanis dengan melakukan program-program yang sesuai dengan keadaan didaerah tersebut. Strategi pencitraan yang diterapkan dengan membentuk cyber truck serta memanfaatkan media sosial untuk pencitraan partai dan bekerja sama dengan ormas-ormas islam. Strategi ketokohan dan kelembagaan yang diterapkan dengan mengembangkan komunitas juang serta memperkuat kelembagaan, perekrutan yang dilakukan dengan tahap penjaringan dan penyaringan.

Dari keempat strategi tersebut strategi ofensif paling dominan karna mampu menciptakan lumbung-lumbung suara yang baru untuk pemilu 2024 serta memperbesar pendukung dari massa tradisional sebelumnya dan strategi ketokohan dan kelembagaan tidak efektif karna hanya memperhitungkan pendapatan suara tanpa mampu mencetak atau menyiapkan kader yang unggul agar bisa disenangi masyarakat.

Kata Kunci: Pemilu 2024, Strategi, Tujuan, PDI-Perjuangan.

**STRATEGI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024**

Oleh

Aldi Darmawan

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

**: STRATEGI PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN PROVINSI
LAMPUNG DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

Nama Mahasiswa

: Aldi Darmawan

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1916021036

Program Studi

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

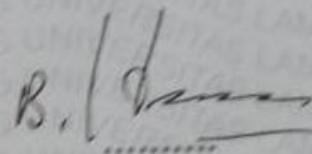
[Signature]

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP
NIP. 196112181989021001

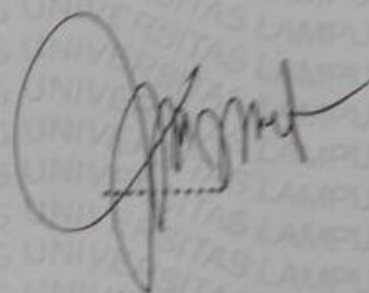
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Budi Harjo, M.IP



Penguji : Darmawan Purba, SJP., M.IP



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 April 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tuis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 18 April 2023
Yang Membuat Pernyataan



Aldi Darmawan
NPM. 1916021036

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Aldi Darmawan, dilahirkan di Desa Pulau Legundi, Kecamatan Punduh Pedada, Kabupaten Pesawaran pada tanggal 16 Juli 1999 yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Ahmad Marzuki dan Ibu Nuzanah. Memiliki seorang kakak laki-laki bernama Nurlis dan adik laki-laki bernama Huzeni.

Jenjang Pendidikan penulis dimulai dari SDN 7 Punduh Pedada pada tahun 2006-2012. Setelah lulus, Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN Satu Atap 4 Pesawaran pada tahun 2012-2015 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN Pulau Legundi pada tahun 2015-2018. Pada tahun 2019 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun 2019.

Selama masa perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Penulis mengikuti berbagai kegiatan baik akademik maupun non akademik dalam menunjang kapasitas diri Penulis. Penulis mulanya bergabung dengan organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (BEM-U) sebagai Korps Muda BEM tahun 2019/2020 dan melanjutkan sebagai Staff Ahli Advokasi Publik (BEM-U) tahun 2020/2021. Di tahun yang sama, tahun 2020/2021, Penulis juga bergabung dengan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Forum Studi Pengembangan Islam (FSPI) sebagai Staf Kajian Strategis.

Karir di dunia kemahasiswaan Penulis dilanjutkan di lembaga eksternal kampus. Pada tahun 2021 Penulis tercatat sebagai anggota biasa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sosial Politik Universitas Lampung setelah melaksanakan

Latihan Kader 1 (*Basic Training*) HMI Komisariat Sosial Politik Universitas Lampung.

Sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi, Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2022 di Desa Margodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya penulis ikut serta program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung.

Demikian segelintir aktivitas sejak rentang tahun 2019 sampai 2023. Seluruh aktivitas dan pencapaian usaha juga kinerja penulis bertujuan sebagai wahana pencapaian diri, sangat jauh dari rekayasa untuk kedigdayaan diri. Harapan Penulis dalam berbagai aktivitas yang dilalui adalah untuk mendukung perolehan pengembangan kapasitas diri, ilmu pengetahuan, dan juga sebagai upaya realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sudah menjadi kewajiban Penulis sebagai insan akademis, pencipta dan pengabdian.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

(QS-Al Insyirah:6)

“Sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi manusia lain”

(HR. Ahmad Thabrani, Daruqutni)

“Jika Kau Menungguku Untuk Menyerah, Kau Akan Menungguku Selamanya”

(Uzumaki Naruto)

“Aku Belum Tentu Kalah, Selama Aku Tidak Menyerah”

(Hinata Shoyo)

“YAKIN USAHA SAMPAI”

“Allah Lagi Allah Terus Allah Selalu”

“KAYA BERMANFAAT, MISKIN BERMARTABAT”

(Aldi Darmawan)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat jasmani dan rohani, menjadi sebaik-baik pelindung, penolong, pengasih dan penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamiin telah engkau ridhoi langkah hambamu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dan semoga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

Teriring sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga dan Sahabat. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak

Dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, aku persembahkan karya sederhana ini kepada sosok manusia yang sangat aku cintai:

Ayah dan Ibu tercinta

Ahmad Marzuki dan Nurzanah

Kakak dan Adik ku tersayang

Nurlis dan Huzeni

Terimakasih untuk semua yang telah mendoakan dan mendukung selesainya skripsi ini, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur Penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan Rahmat serta hidayah yang sangat luar biasa sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024”**. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan menjadi panutan seluruh umatnya.

Skripsi yang berjudul **“Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024”** sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang Penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu digali lebih mendalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggaan bagi Penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan;

4. Bapak Drs. Budi Harjo, M.IP selaku Dosen Pembimbing, terimakasih Bapak atas kritik, saran dan masukan nya sehingga Penulis membuat skripsi ini dengan sebaik-baiknya;
5. Bapak Darmawan Purba S.IP. M.IP selaku Dosen Penguji, terimakasih Bapak atas kritik, saran dan masukan nya sehingga Penulis dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;
6. Bapak Drs. Hi. Amantoto Dwiono, M.H dan Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis. Terimakasih atas bimbingan nya selama ini;
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada Bapak dan Ibu semua. Terimakasih atas dedikasi yang telah engkau berikan kepada Penulis, sehingga Penulis bisa sampai ke posisi ini. Terimakasih atas segala yang engkau berikan;
8. Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan Abang Puput dan Mbak Sella sekaligus abang mbak yang selalu membantu dalam hal administrasi perkuliahan selama ini serta menyemangati didalam perkuliahan, terimakasih yang selalu membantu Penulis dalam proses perkuliahan maupun diluar;
9. Penjaga Gedung D Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Mas Dede, Mas Cecep, dan Mas Adi. Terimakasih sudah mau untuk direpotkan dalam penggunaan ruangan untuk melaksanakan seminar maupun ujian penulis, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT;
10. Kedua orang tua ku yang sangat aku cintai dan aku sayangi, Ayah Ahmad Marzuki dan Ibu Nurzannah yang selalu mengiringi serta mendoakan disetiap langkah penulis. Berkat doa dan usahamu Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
11. Kepada Kakak dan Adikku, Nurlis dan Huzeni terimakasih telah mewarnai hari-hari Penulis serta selalu mensupport disetiap ada permasalahan dan menjadi teman bertukar pikiran;
12. Kepada pemilik NPM 2216011108 Sherly Margaretha, terimakasih sudah hadir menemani, menenangkan, pemberi solusi, serta penyejuk dikala pikiran

mulai beradu dengan segala permasalahan, terimakasih penuh cinta untukmu yang selalu menemaniku sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini;

13. Kepada Abang Yulian Ilhami S.E dan sekeluarga, terimakasih telah membantu memberikan pengajaran dan mensupport dalam proses masuk Perguruan Tinggi;
14. Kepada teman-teman KKN di Desa Margodadi, Shafira, Leona, Myhani, Satria dan Yeni. Terimakasih atas kebersamaan yang indah melalui hari-hari di Desa Margodadi;
15. Kepada masyarakat Desa Margodadi, Bapak Amin selaku Kades Desa Margodadi dan Ibu Kades, Mas Habib, Mas Yudi, Mas Adji, Mas Hafid, Mas Ilul, Mas Izma, Mas Nurzen, Mas Doni dan keluarga besar tim Volly Zig Zag Desa Margodadi, Teh Yuyun, Irma, Irra, Dilla, Novi, Nunung, Ica, Silvy, Ipat, Sheka dan semua yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan;
16. Kepada informan Peneliti, Bapak Sutono, Bapak Watoni Noerdin, Bapak Syahlan Syukur, Bapak Yanuar Irawan dan Bapak Endro. S Yahman;
17. Beasiswa Bidikmisi, terimakasih telah mempercayaiiku untuk mendapatkan Beasiswa;
18. Kepada sahabatku dan keluarga besar angkatan 2019 di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Yoga, Rizal, Parhan, Made, Dito, Riski, Nando, Ghozali, Riski Arap, Daffa, Ayandra, Dede, Iko, Candra, Roro, Wenti, Salsa, Jesika, Dimas, Neha, Widya Siregar, Widya Nurmala, Yolanda, Riska, Riski Ronaldi, Meidina, Caca, Aqiel, Farell, Aropy, Ayu Nurvita, Dea, Oksa, Erika, Febianto, Gilang, Kansius, Otto, Riwan, Icha, Alkat, Nabilla, Ridho Putri, Rifka, Sadewa, Rakha, Fasha, Dewaruci, Devi, Oca, Ebe, Cindy, Ike, Agun, Restu, Irma, Bagas, Fitri, Lutfy, Fatwa, Jimmy, Citra, Vivi, Ferra, Adelia, Nanda Sahda, Nanda Arini, Desi, Gadis, Ema, Suci, Jamal, Nabil, Amalisya, Tamjay, Andika, Lukman, Afriza, Anita Feby, Avon, Ayu Vaulanda, dan Agnes. Terimakasih telah membuat masa perkuliahan Penulis lebih indah daripada masa SMA;

19. Kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya;
20. Kepada diri sendiri yang sudah mampu bertahan dan kuat sehingga bisa sampai ketahap ini;

Terimakasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, baik yang tertulis maupun tidak tertulis namanya dalam sanwacana ini, baik yang bertatap muka maupun yang hanya berjumpa fikiran. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Akan tetapi Penulis berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua dalam keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian khususnya di bidang politik kepada masyarakat Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 18 April 2023
Penulis

Aldi Darmawan

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR DIAGRAM	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Tentang Strategi	15
2.1.1 Definisi Strategi	15
2.1.2 Strategi Kampanye Partai Politik	22
2.2 Tinjauan Tentang Partai Politik	23
2.2.1 Definisi Partai Politik	23
2.2.2 Fungsi Partai Politik	25
2.3 Tinjauan Tentang Pemilihan Umum	27
3.3.1 Pengertian Pemilihan Umum	27
3.3.2 Sistem Pemilihan Umum	29
2.4 Kerangka Pikir	31
III. METODE PENELITIAN	32
3.1 Tipe Penelitian.....	32
3.2 Fokus Penelitian	33
3.3 Penentuan Informan.....	34
3.4 Jenis dan Sumber Data	35

3.5 Teknik Pengumpulan Data	35
3.6 Teknik Pengolahan Data.....	37
3.7 Teknik Analisis Data	38
3.8 Teknik Validasi/Keabsahan Data	40
IV. GAMBARAN UMUM.....	42
4.1 Gambaran Umum Strategi Pemenangan Partai	42
4.1.1 Perumusan Strategi	47
4.2 Gambaran Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	47
4.2.1 Sejarah PDI-Perjuangan	47
4.2.2 Visi, Misi, dan Tujuan	49
4.2.3 Tugas Partai	51
4.2.4 Keanggotaan	52
4.2.5 Penugasan dalam Jabatan Politik dan Jabatan Publik	54
4.3 Gambaran Umum DPD PDI-Perjuangan Provinsi Lampung	55
4.3.1 Logo Organisasi	55
4.3.2 Profil DPD PDI-Perjuangan Provinsi Lampung	56
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	62
5.1 Strategi Defensif	62
5.2 Strategi Ofensif	78
5.3 Strategi Pencitraan	91
5.4 Strategi Ketokohan dan Kelembagaan	103
5.5 Analisis Strategi.....	112
5.5.1 Faktor Penghambat dan Pendukung	114
VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	117
6.1 Kesimpulan	117
6.2 Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	124

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel Survey Charta Politika	4
2. Tabel Survey Lembaga Survey Indonesia	6
3. Tabel Survey Lembaga Survey Indonesia	9
4. Tabel Informan Penelitian	34
5. Tabel Hasil Pemilu 2019	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kerangka Pikir	31
2. Logo PDI-Perjuangan.....	55
3. Rapat Kordinasi Penanaman Pohon	63
4. Penanaman Pohon di Bendungan Batu Tegi	64
5. Senam Cinta Tanah Air	64
6. Reses di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung	76
7. Reses di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung	77
8. Reses di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.....	77
9. Reses di Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.....	77
10. Reses di Lampung Utara	78
11. Gerakan Penghijauan di Kabupaten Pesawaran	78
12. Pembagian Bibit Ikan di Lampung Selatan.....	89
13. Penebaran Benih Ikan di Kecamatan Natar	90
14. Memberikan Mesin Pertanian di Kecamatan Metro Utara	90
15. Memberikan Bantuan Sembako Korban Banjir di Tubaba	91
16. Memberikan Bantuan Untuk Korban Banjir	91
17. Memberikan Bantuan Korban Tanah Longsor di Lampung Barat... 91	91
18. Melakukan Rapat Program Badan Amil Zakat	92
19. Pembagian Nasi Bungkus di Kabupaten Lampung Selatan.....	92
20. Program Zakat di Kabupaten Way Kanan	92
21. Membantu Korban Banjir di Kecamatan Way Lima	100
22. Membagikan Makanan Kepada Korban Banjir.....	101
23. Menabur Benih Ikan di Rusunawa UNILA	101
24. Gerakan Menanam Pohon di UNILA	101
25. Penanaman Pohon di UIN Raden Intan Lampung	102
26. Memberikan Benih Ikan di UIN Raden Intan Lampung.....	102
27. Penjaringan Bakal Calon Legislatif	109
28. Assessment Pendaftaran Bakal Calon Legislatif.....	110
29. Rapat Pengelolaan Media Partai	110
30. Melakukan Pembekalan Media Partai.....	111
31. Pengelolaan Media Sosial Untuk Bangun Citra Partai	111

DAFTAR DIAGRAM

	Halaman
1. Diagram Strategi PDI-Perjuangan Provinsi Lampung.....	112

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi yang ditandai dengan adanya pemilihan umum (pemilu) yang melibatkan masyarakat untuk memilih secara langsung baik pemilihan kepala negara, kepala daerah hingga pemilihan legislatif. Hal tersebut menyimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menaruh kebebasan pada masyarakat dalam menentukan pemimpin baik pemimpin negara, maupun daerah sehingga memberikan warna baru untuk sistem politik di Indonesia. Demikian pentingnya hal tersebut memberikan peluang bagi warga negara Indonesia untuk dipilih dan memilih.

Pemilihan umum tahun 2004 merupakan tahun pertama dalam sejarah bangsa Indonesia melaksanakan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Pemilu secara langsung mendaulat Indonesia sebagai negara paling demokrasi ketiga di dunia setelah Amerika dan India. Pemilu tersebut juga mengakibatkan perubahan strategi dan pendekatan yang dilakukan oleh partai politik. Partai politik dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sedang dalam proses modernisasikan diri (Budiarjo, 2003).

Pelaksanaan pemilu tahun 2019 merupakan pertama kalinya dilaksanakan pemilihan legislatif dan eksekutif secara bersamaan di Indonesia. Pada Pemilu kali ini, masyarakat Indonesia diharuskan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif baik tingkat pusat ataupun daerah, yaitu memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

Setelah era reformasi, jumlah peserta yang ikut serta dalam pemilu bersifat fluktuatif. Tahun 2009 merupakan pemilu dengan peserta terbanyak, yaitu 38

partai politik, di mana 18 di antaranya merupakan partai baru. Kemudian pada tahun 2014, terjadi penurunan yang signifikan sebesar 68% menjadi 12 partai politik. Lima tahun berikutnya, pada Pemilu 2019 terjadi peningkatan peserta sebesar 16,67% dari pemilu sebelumnya, di mana diikuti oleh 14 partai yang memenuhi syarat administrasi dan verifikasi dari 27 partai yang mendaftar. Beberapa partai politik peserta pemilu, diantaranya adalah Partai Demokrat, Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasional Demokrasi (Nasdem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). (*Sumber: Komisi Pemilihan Umum, Tahun 2019*).

Salah satu partai besar peserta pemilu adalah PDI-Perjuangan. PDI-Perjuangan adalah sebuah partai politik di Indonesia yang kelahirannya dikaitkan dengan peristiwa 27 Juli 1996. Peristiwa ini merupakan awal kemunculan Megawati Soekarno Putri di panggung perpolitikan Indonesia secara nasional. PDI Perjuangan sebenarnya merupakan partai yang mempunyai hubungan dengan partai lama ketika orde lama masih berkuasa. PDI-Perjuangan merupakan penerus dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI). PDI berdiri pada tanggal 10 Januari 1973 dan merupakan hasil penggabungan dari 5 (lima) partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katholik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan Murba. (*Sumber: PDI Perjuangan 2015*).

PDI-Perjuangan merupakan salah satu partai terbesar di Indonesia yang selalu meraup suara yang cukup banyak dalam setiap pemilu. Pada pemilu tahun 1999, PDI-Perjuangan mendapatkan suara yang sangat tinggi. PDI-Perjuangan berhasil memperoleh suara sebesar 33,74 % dari total suara dengan 153 kursi di DPR. (*Sumber: KPU, 2011*). Perolehan suara sebesar ini berhasil mengantarkan PDI-Perjuangan menjadi partai pemenang Pemilu pada saat itu. Kemenangan ini diperoleh karena pada saat itu PDI-Perjuangan dianggap sebagai representasi

perlawanan terhadap Orde Baru yang baru saja tumbang pada tahun 1998. Pemilu 1999 juga dapat dikatakan sebagai momentum sejarah yang telah mengubah fokus dari usaha-usaha politik berubah menjadi perubahan partai-partai yang ikut serta dalam pesta demokrasi sehingga pada saat itu jumlah partai yang mengikuti pemilu tidak seperti pemilu pada masa orde baru (Djojosoekarto & Sandjaya, 2008: 34).

Dalam perjalanannya semenjak era reformasi, perolehan suara PDI-Perjuangan pada setiap pemilu mengalami pasang surut. Meskipun mendapatkan kemenangan pada pemilu 1999, namun pada pemilu 2004 PDI-Perjuangan gagal dalam mempertahankan posisinya. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, di mana sebelumnya Presiden dan Wakilnya dipilih oleh MPR. PDI-Perjuangan gagal mengantarkan calon Presiden yang diusungnya serta mengalami penurunan perolehan suara pada Pemilu 2004. Kegagalan PDI-Perjuangan dalam mempertahankan posisinya disebabkan oleh kegagalan PDI-Perjuangan dalam mengatasi korupsi, kolusi dan nepotisme selama partai ini berkuasa di parlemen. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat tidak puas atas kinerja PDI-Perjuangan. (Sitompul 2008).

Penurunan suara PDI-Perjuangan pada Pemilu 2009 disebabkan oleh ketidakmampuan dalam meyakinkan masyarakat dan gagal menempatkan partainya sebagai partai oposisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain itu PDI-Perjuangan pada kampanye 2009 juga sempat melakukan kesalahan strategi komunikasi, yaitu dengan menjadikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai salah satu strategi kampanyenya, padahal sebelumnya PDI-Perjuangan menolak program BLT tersebut. Kemudian di dalam tubuh PDI-Perjuangan sendiri juga mengalami perpecahan pada tahun 2005 yang menyebabkan partai ini terbagi menjadi dua kubu, yaitu PDI Perjuangan dan Gerakan Pembaharuan PDI-Perjuangan (Sitompul 2008). Perpecahan ini juga menyebabkan suara pendukung partai ini tidak menyatu.

Terkait pemilihan umum 2024 mendatang, di Provinsi Lampung tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PDI-Perjuangan menurun. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PDI-Perjuangan dikarenakan pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dimana kebijakan tersebut di tolak masyarakat seluruh Indonesia, penolakan juga terjadi di Provinsi Lampung di mana kebijakan tersebut akan membebani masyarakat, hal tersebut berdampak kepada PDI-Perjuangan. Masyarakat berfikir kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah kebijakan presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo, yang mana Joko Widodo merupakan presiden RI yang di usung oleh PDI-Perjuangan dan merupakan kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Lembaga survei Charta Politika melakukan survey di Provinsi Lampung (22/9/2022), terkait elektabilitas partai politik jelang Pemilu 2024. Tren elektabilitas PDI-Perjuangan mengalami penurunan, sementara Partai Gerindra cenderung naik. (*sumber: hasil survei charta politika*). Berikut survey yang dilakukan oleh Charta Politika dengan hasil:

Tabel 1.1 Hasil Survey Charta Politika

No	Nama Partai	Perolehan Suara Menurut Survey
1	PDIP	21,4%
2	GERINDRA	14,8%
3	GOLKAR	9,3%
4	PKB	8,7%
5	PKS	7,6%
6	DEMOKRAT	6,6%
7	NASDEM	4,8%
8	PAN	2,7%
9	PPP	2,1%

10	PERINDO	2%
11	PSI	0,9%
12	PBB	0,6%
13	HANURA	0,4%
14	BURUH	0,3%
15	GARUDA	0,2%
16	PARSINDO	0,2%
17	GELORA	0,2%
18	PKN	0,1%
19	PKP	0,1%
20	TT/TJ	17,0%

Sumber: diolah peneliti, tahun 2023.

PDIP, Gerindra, dan Golkar merupakan partai politik tertinggi pilihan responden. Tren elektabilitas PDIP mengalami penurunan, pada April 2022 24,7%, Juni 2022 24,1%, dan September 21,4%. Sementara Gerindra cenderung mengalami peningkatan, pada April 2022 11,9%, Juni 2022 13,8%, dan September 14,8%. Sedangkan Golkar, pada April 2022 9,2%, Juni 2022 11,3%, dan September 9,3% (22/9/2022).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengalami penurunan tingkat kepercayaan masyarakat di Provinsi Lampung, hal tersebut dikarenakan pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dimana kebijakan tersebut sangat membebani rakyat dan membuat rakyat tidak percaya lagi kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karna PDI-Perjuangan merupakan partai pengusung Jokowi-Ma'ruf di pilpres 2019 silam.

Pengalaman masyarakat yang sudah melek politik, telah mengetahui dan melihat bahwa hampir setiap menjelang pemilu, BBM selalu mengalami kenaikan. Kondisi ini kurang menguntungkan bagi Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan yang menjadi lokomotif partai koalisi Jokowi-Amin dan sebagai partai wong cilik yang selama ini menjadi garda terdepan pembela kaum tertindas. Jika BBM subsidi naik, maka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bisa babak belur dihajar partai yang beda pilihannya pada pemilu 2024 mendatang.

Selain hasil survey dari charta politika, Lembaga Survei Indonesia (LSI) di bulan Februari 2022 juga melakukan survey terhadap partai yang di sukai masyarakat lampung. Hasil survei terhadap partai yang disukai oleh masyarakat Lampung, berupa:

Tabel 1.2 hasil survey Lembaga Survey Indonesia (LSI)

No	Nama Partai	Perolehan Suara Menurut Survey
1	PDIP	38,4%
2	GERINDRA	13,1%
3	GOLKAR	10,6%
4	PKB	7,6%
5	DEMOKRAT	7,4%
6	NASDEM	4,3%
7	PKS	3,9%
8	PAN	2,3%
9	PPP	1,1%
10	Partai Lain	-1%

Sumber: di olah peneliti, tahun 2023.

Dari hasil ini yang perlu dicermati adalah:

Pertama, keberadaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang teratas merupakan hal yang wajar karena dianggap partai pemerintah mulai pusat sampai ke-daerah, terlebih kinerja para Bupati dan Walikota yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga menunjukkan kerja yang konkret: seperti di Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung.

Kedua, Keberadaan Gerindra di Posisi Kedua cukup mengejutkan sebagai partai yang minim kader sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, hanya berposisi sebagai partai pengusung kepala daerah mampu berada di peringkat kedua menunjukkan bahwa keberadaan kader partai baik sebagai anggota legislative dan pengurus partai mampu melaksanakan konsolidasi demokrasi, mendorong kebijakan yang pro terhadap rakyat dan melakukan kerja-kerja nyata untuk rakyat.

Ketiga, yang mengejutkan keberadaan Golkar 10.6% dan PKB 7.6% berada di posisi ketiga dan keempat, angka ini menjadi kurang wajar bila dikomparasikan dengan keberadaan Gubernur Lampung sebagai Ketua DPD Partai Golkar dan Wakil Gubernur sebagai Ketua DPD Partai PKB, hasil survey ini memberikan simpulan bahwa elektabilitas keduanya menurun.

Sedangkan hasil survei lain yang dilakukan Litbang Kompas Oktober 2022, PDI Perjuangan dan Partai Golkar nyaris kehilangan suara pemilih generasi Z (17-25 tahun). Elektabilitas Golkar di kalangan pemilih Gen Z saat ini berada di level 3,9 persen, sebelumnya pada Juni 2022 sebanyak 9,5 persen.

PDIP pada Oktober 2022 memperoleh 19 persen, yang mana sebelumnya pada Juni 2022 mendapatkan 20,4 persen. Hal serupa juga dialami PAN, pada Oktober 2022 mendapatkan 3,3 persen, padahal pada Juni 2022 memperoleh 4,4 persen. Namun, Partai Demokrat mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan. Yang mana, pada Juni 2022 mendapatkan 15 persen, dan pada Oktober 2022 meraih 18,4 persen. Tak hanya Demokrat, Partai Perindo pun memperlihatkan tren meningkat yang cukup tajam. Pada Juni 2022, Partai Pimpinan Hary Tanoesoedibjo itu hanya memperoleh 4,4 persen, namun pada Oktober 2022 mampu mendapatkan 8 persen suara pemilih generasi Z. PKS dan Partai NasDem juga mengalami tren peningkatan, yang mana PKS mendapatkan 5,6 persen sebelumnya hanya 4,1 persen. Sementara, NasDem 4,5 persen sebelumnya 3,7 persen. (Litbang Kompas: 3/11/2022)

Selain kebijakan kenaikan harga BBM penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terjadi karena pencalonan Puan Maharani sebagai presiden di tahun 2024 mendatang dimana Puan Maharani tidak meningkatkan elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Studi eksperimental yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan bahwa Puan Maharani tidak akan memiliki efek positif bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan jika dicalonkan sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Pencalonan Puan Maharani dinilai tidak memiliki pengaruh bahkan cenderung memperlemah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, maka akan memberikan efek positif terhadap suara PDI-P untuk pemilihan legislatif.

Dalam survei itu SMRC menemukan 43 persen responden akan memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan jika mencalonkan Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden. Ganjar Pranowo akan memperkuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara signifikan. Tanpa Ganjar itu hanya 28 persen, jika mencalonkan Ganjar menjadi 43 persen, naik sekitar 15 persen. Apabila Anies Baswedan dicalonkan PDI-P dalam Pilpres 2024, maka ada 38 persen responden yang akan memilih PDI-P. Angka yang kurang lebih sama, yaitu 36 persen, didapati jika PDI-P mencalonkan Prabowo Subianto.

Dengan demikian secara keseluruhan Ganjar Pranowo memiliki pengaruh paling positif pada peningkatan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yakni sekitar 14,7 persen. Sementara pengaruh Anies sebesar 9,9 persen dan Prabowo 8,4 persen. Sedangkan pengaruh Puan terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di nilai negatif.

Survey lain juga dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terkait elektabilitas calon presiden (capres) di Lampung. Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan Prabowo Subianto menjadi kandidat capres dengan elektabilitas tertinggi, berikut hasil survey:

Tabel 1.3 hasil survey Lembaga Survey Indonesia (LSI)

No	Nama Capres	Perolehan Suara Menurut Survey
1	Prabowo Subianto	26,1%
2	Ganjar Pranowo	23,1%
3	Anies Baswedan	16,6%

Sumber: di olah peneliti, tahun 2023.

Prabowo Subianto masih menjadi pilihan pertama bagi masyarakat Lampung. Prabowo Subianto dipilih karena alasan tegas dan berwibawa. Selain itu Prabowo Subianto paling populer di antara calon lainnya. Popularitas Prabowo mencapai 96,9%. Tingkat kesukaan dan keterpilihan partai banyak ditentukan oleh tokoh yang ada di partai tersebut. Misalnya, Gerindra tampaknya masih banyak dipengaruhi oleh ketokohan figur pendiri sekaligus ketua umumnya, yakni Prabowo Subianto. Yang juga berpengaruh adalah ketokohan di tingkat provinsi Lampung seperti Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang juga adalah anggota DPR RI dari Dapil Lampung I.

Hasil survei LSI tersebut menyimpulkan, dari simulasi semi terbuka (banyak nama) dan boleh menyebutkan nama lainnya, Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto paling banyak dipilih, 26.1%, mengungguli nama-nama lainnya. Prabowo Subianto dipilih terutama karena alasan tegas dan berwibawa. Selain itu Prabowo Subianto paling populer, mencapai 96,9%, dengan tingkat kesukaan yang sangat baik mencapai 79,2%. (sumber: lembaga survei Indonesia, 16/11/2022).

Kedisukaan dan tingkat keterpilihan partai banyak ditentukan oleh tokoh yang ada di partai tersebut. Misalnya, dipengaruhi oleh ketokohan figur pendiri

sekaligus ketua umumnya yakni Prabowo Subianto. Yang juga berpengaruh adalah ketokohan di tingkat provinsi Lampung seperti Sekretaris Jenderal Partai Gerindra (Ahmad Muzani) yang juga adalah anggota DPR RI dari Dapil Lampung 1 dan ketokohan para anggota DPRD di provinsi Lampung seperti Pattimura (Sekretaris Umum DPD Gerindra Lampung) dan Rahmat Mirjani Djausal (Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung).

Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, hal tersebut membuat partai lain akan menyalip dengan mudah posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang masih berada di urutan pertama dengan tingkat kepercayaan masyarakat Provinsi Lampung yang masih tinggi, bukan tidak mungkin jika satu tahun mendatang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengalami penurunan yang signifikan jika mencalonkan Puan Maharani sebagai presiden atau ada hal lain yang membuat masyarakat merasa dirugikan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang menyulitkan masyarakat.

Hal tersebut harus diperhitungkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan guna bertahan di posisi dengan tingkat kepercayaan masyarakat tertinggi di Provinsi Lampung. Strategi-strategi harus dipergunakan untuk mempertahankan posisi sebagai partai dengan tingkat kepercayaan tertinggi di Provinsi Lampung.

Untuk memenangkan pemilu tahun 2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempunyai strategi dalam memenangkan pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Dimana menurut Rangkuti (2009, h:3) strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan Firmanzah (2008 h 259) mengatakan strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus dan saling berhubungan dalam hal waktu dan ukuran. Jadi strategi disini merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan-kekuatan (baik ideologi, politik, sosial, budaya ataupun hukum) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024” Sebagai bahan referensi atas penelitian ini Peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul peneliti sebagai berikut:

Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Nofriadi, Effendi Hasan, dan Ubaidullah Helmi dengan judul Strategi Pemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Tengah dengan hasil: 1.) Marketing politik dan Strategi politik menempatkan partai demokrasi Indonesia perjuangan sebagai partai pemenang yang memiliki suara terbanyak, dan partai demokrasi Indonesia perjuangan Kabupaten Aceh Tengah memberikan kontribusi besar terhadap perubahan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan dijalankannya strategi dan juga rencana yang matang. Strategi ini juga tentunya harus memiliki usaha serta kerjasama yang keras, dengan adanya kerjasama yang dilakukan antara kader PDI-P Aceh Tengah dapat menghilangkan rasa egois dari para kader PDIP. 2.) Salah satu hal yang unik dari strategi pemenangan partai PDIP Aceh Tengah ini adalah adanya istilah “Ngopi Murum”. Istilah ini dapat diartikan sebagai kegiatan ngopi bersama yang dilakukan oleh para kader PDIP Aceh Tengah bersama masyarakat. Tentunya dengan adanya ngopi bersama ini, kedekatan para calon legislatif PDIP Aceh Tengah bersama masyarakat akan semakin erat. 3.) Menggunakan strategi pendekatan kepada masyarakat seperti memberikan penjelasan tentang ideologi partai terhadap masyarakat, meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, meningkatkan silaturahmi dengan masyarakat. Serta strategi marketing politik. Seperti, adanya peningkatan pencarian kaderisasi, adanya kerjasama koalisi antara partai, membentuk tim sukses, meningkatkan kualitas dan kuantitas calon legislatif, dan memperkuat struktur partai.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Jenifer Pesak, Daysi Posumah, dan Trilke Tulung dengan judul Strategi Pemenangan Partai Solidaritas Indonesia Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Manado Tahun 2019 dengan hasil: 1.) Pada pemilihan umum tahun 2019, partai solidaritas Indonesia, mengedepankan kampanye sebagai partai politik yang anti money Politik, hal ini di lakukan sebab kebanyakan partai politik melalui calon yang ada menggunakan starategi politik uang untuk membayar suara masyarakat untuk memilih. 2.) Partai Solidaritas Indonesia, Kota Manado dalam melakukan kampanye menawarkan kebarharuan bagi sistem kerja dan komunikasi anggota DPRD terhadap masyarakat. 3.) Dalam kampanye yang dilakukan oleh PSI pada pemilu tahun 2019, yang ditonjolkan adalah tokoh-tokoh yang memiliki prestasi di bidang masing-masing. 4.) Target pengumpulan suara adalah pemilihan pemula yang menginginkan adanya perubahan dan pembaharuan.

Pada penelitian ketiga yang dilakukan oleh Ariel Kristianto Pura dengan judul Strategi Pemenangan Dalam Pemilihan Umum Calon Legislatif Partai Gerindra Di Desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019 dengan hasil: Strategi pemenangan calon legislatif terpilih dari partai Gerindra dilakukan dengan cara maksimalisasi peran partai pendukung, maksimalisasi peran tim sukses, melakukan komunikasi politik dengan masyarakat pemilih, pembentukan program-program social kemasyarakatan, pemanfaatan modalitas social dan modalitas politik.

Pada penelitian keempat yang dilakukan oleh Dendy Irwansyah dengan judul Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dalam Pemenangan Pilkada 2017 (Studi Di DPC PDIP Kabupaten Brebes) dengan hasil: 1.) Berdasarkan rekomendasi dari petinggi partai yang berada di pusat. Sementara itu, di sisi lain. PDI Perjuangan terlalu begitu kuat di Kabupaten Brebes. Ini yang membuat keseimbangan demokrasi berkurang. 2.) Dengan masih banyaknya kekuatan ekonomi yang digunakan, baik dengan perebutan sebagai bakal calon maupun menggunakan kekuatan ekonominya pada masa pilkada.

Jika ekonomi yang selalu menjadi acuan disaat pilkada, maka bupati dan wakil bupati yang terpilih tidak menutup kemungkinan ada suatu yang disebut penggelapan uang di pemerintahan. 3.) Kuatnya PDI Perjuangan di Kabupaten Brebes. Di dasari oleh ikatan emosional yang begitu erat, antara masyarakat dan PDI Perjuangan. Hingga penelitian ini dibuat, belum ada partai politik di Kabupaten Brebes yang sudah satu level dengan PDI Perjuangan. 4.) Kemudian masih adanya money politik. Masih adanya pemberian uang dari masing-masing kandidat calon kepada masyarakat. Walaupun di Kabupaten Brebes sendiri sudah menjadi basis yang sangat kuat dari PDI Perjuangan, tetapi masih ada juga money politik.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Vikri Wanto dengan judul Strategi Pemenangan Partai Politik Golkar Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Nagan Raya dengan hasil: Ada banyak strategi yang digunakan oleh Partai Golkar Nagan Raya dalam memenangkan pemilu 2014. Strategi yang digunakan mulai melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan, Pemasangan baliho, spanduk, iklan radio dan Kampanye, Sosialisasi dan pendidikan politik kepada simpatisan dan masyarakat umum secara terus menerus dengan tujuan membentuk citra politik yang positif baik bagi partai maupun bagi calon-calon legislatif itu sendiri. Sedangkan Hambatan yang dihadapi oleh Partai Golkar Nagan Raya dalam memenangkan pemilu 2014 adalah dalam memenuhi kuota 30 % keterwakilan perempuan itu. kendala Partai Golkar Nagan Raya dalam merekrut 30% Caleg perempuan, setiap pengurus diwajibkan untuk mencari caleg perempuan yang bersedia maju.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di angkat dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024"?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang Peneliti uraikan ke dalam bentuk pertanyaan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dihasilkan dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu sosial dan politik, khususnya dalam bidang Politik yang berkaitan dengan Strategi Pemenangan Partai Dalam Pemilihan Umum.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan informasi, dan sebagai bahan refleksi maupun suatu peringatan bagi partai politik dalam memenangkan pemilihan umum

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Strategi

2.1.1. Definisi Strategi

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “stratos” yang artinya tentara dan “agein” yang berarti memimpin. Maka strategi dapat diartikan sebagai memimpin tentara. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Ada berbagai macam pengertian tentang strategi yang dikemukakan oleh para ahli dalam karya mereka masing-masing.

Menurut Marrus dalam Umar (2002:31), strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Menurut Rangkuti (2009, h:3) strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan Firmanzah (2008 h 259) mengatakan strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus dan saling berhubungan dalam hal waktu dan ukuran. Jadi strategi disini merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan-kekuatan (baik idiologi, politik, sosial, budaya ataupun hukum) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Mintzberg (2007. h:306) menyebutkan jika konsep strategi itu mencakup beberapa arti yang saling terkait. Dimana strategi adalah:

1. Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjang
2. Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi
3. Sudut yang diposisikan oleh organisasi saat memunculkan aktivitasnya
4. Suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya yang menjadi batas aktivitasnya
5. Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui para pesaing

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, menurut Prahalad (Nimmo, 2005:121) pengertian strategi adalah tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Strategi lebih mengarah pada tindakan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan. Didalam strategi terdapat susunan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sesuai penjelasan tentang pengertian strategi dari beberapa ahli, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa strategi adalah suatu cara yang dirancang dan dirumuskan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi politik digunakan dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan politik untuk menarik simpati atau dukungan khalayak luas untuk mendukung suatu kebijakan yang telah ditentukan, sesuai dengan tujuan partai politik tersebut. Hal tersebut sesuai dengan definisi strategi yang dikemukakan oleh Prahalad (Nimmo, 2005:121) maka dalam penelitian ini secara sederhana yang dimaksud dengan strategi adalah cara-cara yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung dalam Pemilihan Umum Tahun tahun 2024.

Sejak abad modern, penggunaan istilah strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni panglima memimpin dalam peperangan, akan tetapi sudah

digunakan secara luas hampir dalam semua bidang ilmu. Dalam arti luas, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Strategi juga diartikan sebagai pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Prihatmoko Joko & Moesafa (Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai, 2008 160-161) menjelaskan bahwa strategi politik adalah segala rencana dan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh kemenangan dalam pemilu. Strategi mencakup berbagai kegiatan diantaranya menganalisa kekuatan dan potensi suara yang akan diperoleh, dan untuk mengetahui metode pendekatan yang diperlukan dalam pemilu. Kemudian untuk mencapai tujuan dalam suatu politik, banyak strategi yang harus dilakukan oleh para kandidat atau pun partai politik. Menurut Peter Schroder dalam memilih (Nursal, Adman 2004:162) pola dasar strategi yang diperlukan harus kita kenali agar dapat menetapkan pilihan yang tepat. Ada beberapa strategi yang harus dilakukan, yaitu:

a. Strategi Defensif

Strategi defensif akan muncul ke permukaan apabila partai pemerintah atau sebuah koalisi pemerintah yang terdiri atas beberapa partai ingin mempertahankan mayoritas pasar. Selain itu, strategi ini muncul apabila sebuah pasar tidak dipertahankan lebih lanjut atau ingin ditutup, dan penutupan pasar ini diharapkan membawa keuntungan sebanyak mungkin. Dalam strategi mempertahankan pasar, partai harus mempertahankan pemilih tetap mereka dan memperkuat pemahaman para pemilih musiman mereka sebelumnya pada situasi yang

berlangsung. Partai-partai yang ingin mempertahankan pasar, akan mengambil sikap yang bertentangan dengan partai-partai yang menerapkan strategi ofensif. Partai-partai yang menerapkan strategi defensif menjalankan sebuah pemeliharaan secara intensif terhadap beberapa bidang yang ada, serta menawarkan intensif kepada para kader. Data-data tentang keberhasilan yang diperoleh disebarluaskan ke lingkungan sekitar. Investigasi terutama dilakukan dibidang kehumasan. Dalam organisasi, proses semakin dipermudah, rutinitas dikembangkan dan dengan demikian pengeluaran ditekan. Mayoritas partai-partai yang menerapkan strategi defensif adalah partai yang sudah lama berdiri dan sudah memiliki banyak simpatisan diseluruh wilayah.

b. Strategi Ofensif

Strategi ofensif selalu dibutuhkan apabila partai ingin meningkatkan jumlah pemilihnya, atau apabila pihak legislatif ingin mengimpelmentasikan politik yang akan diberikan, perbedaan terhadap keadaan yang berlaku saat itu serta keuntungan-keuntungan yang dapat diharapkan. Dalam strategi ini memperluas pasar dan menembus pasar adalah kuncinya. Strategi ini sangat dibutuhkan apabila suatu partai ingin menambah atau meningkatkan jumlah masa pemilihnya. Dalam hal ini, harus ada banyak orang yang memiliki pandangan positif terhadap partai tersebut, sehingga nantinya kampanye yang akan dilaksanakan partai politik dapat berhasil.

Strategi perluasan pasar, bertujuan untuk membentuk kelompok pemilih baru disamping para pemilih yang telah ada. Oleh karena itu harus ada suatu penawaran yang lebih baik bagi para pemilih yang selama ini memilih partai pesaing. Strategi ini perlu dipersiapkan melalui sebuah kampanye untuk menjelaskan kepada publik tentang penawaran baru dan penawaran mana saja yang lebih baik dibandingkan dengan penawaran-penawaran lainnya dari partai- partai lainnya. Perluasan pasar ini dapat dicapai dengan isu dan agenda

kampanye yang bermutu dan kreatif. Selain itu, penawaran tersebut harus memperhatikan keuntungan-keuntungan yang diperoleh masyarakat dari partai baru ini. Sedangkan strategi menembus pasar, adalah strategi penggalan potensipotensi yang sudah ada secara optimal. Hal ini menyangkut pemasaran program-program yang dimiliki secara lebih baik ke masyarakat umum dan peningkatan intensitas keselarasan antara program dan individu kader partai, seperti halnya memperbesar tekanan terhadap kelompok-kelompok target. Mayoritas partai-partai yang menerapkan strategi ofensif adalah partai yang baru berdiri dan masih sedikit memiliki simpatisan di seluruh wilayah. Partai dan kader harus mengetahui secara mendalam potensipotensi keunggulan dari Partai maupun dari para kader. Keunggulan potensi tersebut bisa digunakan oleh partai maupun kader dalam melakukan kampanye, agar mendapatkan konstituen tetap pada pemilu.

c. Strategi Pencitraan

Strategi ini banyak dilakukan di media elektronik seperti televisi dan media sosial seperti facebook dan twitter. Selain itu, media cetak juga sering digunakan para calon untuk membangun pencitraan masing-masing calon. Strategi pencitraan biasanya digunakan untuk membangun pola pikir masyarakat terhadap partai atau calon tertentu. Strategi ini sangat cocok digunakan oleh partai baru yang ingin memperkenalkan partai dan calonnya kepada masyarakat umum guna meningkatkan jumlah pemilihnya.

d. Strategi Ketokohan dan Kelembagaan

Strategi ini dilakukan oleh caleg yang memiliki peran di masyarakat sebagai seseorang yang dihormati ataupun memanfaatkan ketokohan yang dimiliki orang lain sebagai jaringan untuk mendapatkan suara, dan memantapkan lembaga politik atau lembaga organisasi lainnya yang dimilikinya dalam masyarakat.

Strategi ini merupakan strategi kampanye yang merupakan pemikiran dari Arifin (2006;102). Di samping memanfaatkan ketokohan dan memantapkan kelembagaan, diperlukan pula kemampuan dan dukungan lembaga dalam menyusun pesan politik, menetapkan metode dan memilih media politik yang tepat agar proses komunikasi politik berjalan dengan baik.

1. Ketokohan

Arifin (2006: 54-55) menyatakan bahwa beberapa hasil studi menunjukkan kecenderungan pemberi suara dalam pemilihan umum untuk menjatuhkan pilihannya kepada pahlawan politik, yaitu kandidat yang sesuai dengan citra jabatan ideal baginya. Citra jabatan yang ideal yang dimaksud itu ialah politikus yang memiliki ketokohan, karena mempunyai sifat-sifat utama seperti kecakapan, kedewasaan, kejujuran, keberanian dan sebagainya. Hal itu merupakan sifat-sifat kepahlawanan politik. Dengan demikian pahlawan politik telah memiliki daya tarik tersendiri, dalam proses komunikasi politik untuk mempengaruhi khalayak terutama calon pemilih.

Seorang tokoh politik yang disebut sebagai pahlawan politik pada dasarnya adalah seorang pemimpin formal maupun informal, yang mendapat kepercayaan publik atau khalayak. Dalam komunikasi politik terutama retorika politik atau pidato politik di hadapan massa, pada hakekatnya khalayak akan memperhatikan siapa (tokoh politik) di banding apa (pesan politik) yang akan disampaikan. Artinya khalayak akan tertarik bukan kepada isi pidato akan tetapi tertarik dengan siapa yang sedang melakukan pidato. Hal ini menunjukkan bahwa ketokohan adalah hal yang sangat utama dalam komunikasi politik.

Dengan demikian menurut Arifin (2006: 55-57), ketokohan dalam politik yang kemudian melahirkan kepahlawanan politik dan kharisma dapat diperoleh karena kredibilitas, yaitu dapat dipercaya

karena karakter dan moralitas yang terpuji dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Kepercayaan itu juga tumbuh karena adanya keahlian atau kemampuan dan ketrampilan dalam menyampaikan substansi pesan yang dikuasainya. Keahlian diperoleh dalam waktu yang lama melalui pembelajaran atau pendidikan formal maupun informal.

2. Memantapkan Kelembagaan

Memelihara atau memanfaatkan ketokohan dijadikan sebagai langkah strategis utama untuk melakukan komunikasi politik. Selain itu, langkah strategis utama yang harus dilakukan adalah membina lembaga politik atau memantapkan kelembagaan politiknya. Anwar Arifin (2006: 61-63) menyatakan bahwa ketokohan seorang politikus, aktivis atau profesional akan meningkat jika didukung oleh lembaga yang ternama atau berkiprah dalam lembaga tersebut. Jadi lembaga merupakan sebuah kekuatan yang besar dalam membantu proses komunikasi politik yang efektif. Kelembagaan ini adalah suatu lembaga yang ada dimasyarakat yang diikuti oleh kader suatu partai.

Konsep-konsep strategi partai dalam pemilihan umum legislatif untuk mendapatkan kemenangan dalam pemilihan umum yaitu dengan adanya konsep pemetaan politik. Antara lain konsep pemetaan jaringan dan pemetaan perilaku pemilih. Konsep pemetaan jaringan memiliki beberapa indikator, diantaranya adalah pengelompokan jaringan yang potensial menjadi mesin politik yaitu mencakup masyarakat umum baik dari kader partai internal maupun dari konstituen bebas, memetakan wilayah dari masing-masing jaringan, dan mengelompokkan nama-nama yang memiliki potensi menjadi tim sukses.

Output atau hasil dari konsep ini adalah terbentuknya strategi mobilisasi, yaitu strategi yang dilakukan dengan mengerahkan sumber daya yang ada dan yang telah dibina untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah

dalam melakukan kampanye dan menanggulangi atau mengatasi ancaman baik dari luar maupun dari dalam partai.

2.1.2 Strategi Kampanye Politik

Menurut Nasution (2006), strategi dalam pengertian sempit maupun luas terdiri dari tiga indikator, yaitu tujuan (*ends*), sarana (*means*), dan cara (*ways*). Dengan demikian strategi adalah cara yang digunakan dengan menggunakan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan akhir dalam kampanye pemilihan legislatif adalah untuk membawa calon legislatif yang didukung oleh tim kampanye politiknya menduduki jabatan legislatif yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Agar tujuan akhir tersebut dapat dicapai, diperlukan strategi yang disebut strategi komunikasi dalam konteks kampanye politik.

Terdapat tiga jenis strategi komunikasi dalam konteks kampanye politik (Arifin, 2006), yaitu (1) Ketokohan dan kelembagaan, dengan cara memantapkan ketokohan dan merawat kelembagaan, (2) Menciptakan kebersamaan dengan memahami khalayak, menyusun pesan persuasif, menetapkan metode, serta memilah dan memilih media, (3) Membangun konsensus, melalui kemampuan berkompromi dan kesediaan untuk membuka diri. Berdasarkan pemaparan diatas, keberhasilan strategi kampanye dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

1) Tujuan (*ends*)

Tujuan didefinisikan oleh Masrun (1986:8) adalah suatu sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain maupun bertindak kreatif dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya. Menurut H.R Daeng Naja (2005:9) tujuan adalah misi sasaran yang ingin

dicapai oleh suatu organisasi di masa yang akan datang dan manajer bertugas mengarahkan jalannya organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Maka peneliti menyimpulkan bahwa tujuan adalah suatu langkah awal yang dirancang oleh suatu kelompok atau organisasi sebagai sesuatu yang ingin dicapai dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

2) Sarana (*means*)

Definisi sarana yang dijelaskan oleh Sagne dan Brigs dalam (Latuheru, 1988:13) adalah alat secara fisik untuk menyampaikan isi pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Maka dapat disimpulkan bahwa sarana adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala jenis bentuk yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan.

3) Cara (*ways*)

Menurut Drs. Agus M. Hardjaja (2002) mendefinisikan cara atau metode adalah cara yang sudah dipikirkan masak-masak dan dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah tertentu guna mencapai tujuan yang hendak dicapai. Cara tersusun secara sistematis yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

2.2 Tinjauan Tentang Partai Politik

2.2.1 Definisi Partai Politik

Menurut Sulistyowati (2009) dalam buku Wibowo (2017:5) partai politik adalah suatu organisasi yang berorientasi kepada pencapaian legitimasi kekuasaan atas pemerintahan melalui proses pemilu. Syaibani mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang mempersatukan dan dimotivasi oleh ideologi tertentu serta berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintah melalui pemilu.

Menurut Budiardjo (2003) partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir setiap anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-

cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik dengan cara inkonstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Carl J. Friedrich (Budiarjo 2017:14) mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materil.

Partai politik sebagai salah satu sarana untuk berpartisipasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai tujuan, nilai-nilai serta cita-cita yang sama dan mempunyai tujuan kekuasaan untuk menciptakan dan menjalankan kebijakan-kebijakan mereka. Partai politik sebagai kekuatan politik adalah suatu gejala baru bagi semua negara di dunia ini, dalam artian bahwa umurnya tidak setua umur peradaban manusia. Menurut catatan para ahli pada tahun 1950-an, hampir semua *nation-state* di dunia sudah memiliki partai politik.

Partai politik dalam artian modern adalah salah satu organisasi masa yang berusaha untuk mempengaruhi proses politik, merubah kebijakan atau aturan dan mendidik para pemimpin serta mengejar penambahan anggota. Menurut Neuman dalam buku (Wibowo, 2017:6) mengatakan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah dan merebut dukungan rakyat atas persaingan dengan suatu golongan lainnya yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Dari beberapa pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa partai politik adalah suatu organisasi yang berusaha menghimpun kekuatan dan dukungan rakyat dan berusaha menempatkan anggotanya yang

berkualitas untuk menjadi wakil partainya dalam menjalankan dan mengendalikan kekuasaan dan pemerintahan yang sedang berjalan.

2.2.2 Fungsi Partai Politik

Fungsi dari partai politik menurut Miriam Budiardjo dalam A. Rahman H. I (2007:103-104) terkait fungsi partai politik yang melekat dalam suatu partai politik sebagai berikut.

a. Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat dan aspirasi masyarakat ditengah keberagaman pendapat masyarakat modern yang terus berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tidak berbekas apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada, proses tersebut dinamakan (*interest aggregation*). Setelah penggabungan pendapat dan aspirasi tersebut diolah dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga kesimpang siuran pendapat dalam masyarakat berkurang (*interest articulation*). Jika peran utama ini tidak dilakukan pasti akan terjadi kesimpang siuran isu dan saling berbenturan. Setelah itu, partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan yang kemudian dimasukan dalam program atau platform partai untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*). Demikianlah tuntutan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik. Di sisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebar luaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi dua arus komunikasi dari atas ke bawah maupun bawah ke atas informasi tersampaikan dengan baik. Peran partai sebagai penghubungan sangat penting, karena disatu pihak kebijakan pemerintah perlu perlu dijelaskan kepada seluruh masyarakat, dan dipihak lain juga pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat. Menurut

Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Namun tak jarang pelaksanaan fungsi komunikasi politik ini menghasilkan informasi yang mengandung isu-isu yang meresahkan masyarakat karena memihak salah satu kelompok (Miriam Budiardjo, 2003:406)

b. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan sebuah proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada. Proses ini merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (*political culture*) suatu bangsa karena proses penyampaiannya tersebut berupa norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

A. Rahman H. I. juga mengatakan bahwa fungsi sosialisasi politik partai juga dapat dipandang sebagai suatu upaya menciptakan citra bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Lebih penting lagi apabila partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi untuk mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan bersama.

c. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan fungsi untuk mempersiapkan kepemimpinan internal maupun nasional karena setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas untuk dapat mengembangkan partainya. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas

dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

d. Pengatur Konflik Politik

Pengatur konflik politik merupakan fungsi untuk membantu mengatasi konflik diantara masyarakat atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatif nya dapat ditekan seminimal mungkin. Pendapat lain menurut ahli Arend Lijphart (dalam A. Rahman H.I., 2007:103-104) perbedaan-perbedaan atau perpecahan di tingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerja sama di antara elite-elite politik. Dalam konteks kepartaian, para pemimpin partai adalah elite politik.

Sedangkan fungsi partai politik berdasarkan undang-undang partai politik di Indonesia yaitu, Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi Warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

2.3 Tinjauan Tentang Pemilihan Umum

2.3.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah salah satu syarat dari negara demokrasi. Di dalam pemilihan umum, masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk

berpartisipasi dalam memilih calon pemimpinnya yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat secara langsung. Pemilihan umum adalah salah satu pesta demokrasi yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, khususnya kader-kader partai politik. Selain itu, pemilihan umum dianggap sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik.

Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menurut T. May Rudy (2009:87), pemilihan umum adalah sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Pemilu adalah pengejawantahan sistem demokrasi. Melalui pemilu rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan.

Menurut Ali Moertopo (1974:) pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermakna dalam pembukaan UUD 1945. Menurut Suryo Untoro, pemilu adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih untuk wakil-wakilnya yang duduk dalam badan perwakilan rakyat. Sedangkan menurut Ramlan Surbakti (1992 h 181) pemilu adalah mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.

Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pasal 1 angka 1 disebutkan pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian dalam undang-undang ini juga sama persis dengan Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Dalam pasal 1 Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, terlihat bahwa Pemilu ditujukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik provinsi dan kabupaten/kota (berdasar angka 2 Pasal 1 Undang-undang nomor 8 tahun 2012 dan Undang-undang nomor 15 tahun 2011). Selain memilih anggota legislatif seperti yang telah dipaparkan diatas, Pemilu juga untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Berkenaan dengan hal tersebut maka diatur dalam Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

2.3.2 Sistem Pemilihan Umum

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, menurut Ramlan Surbakti (1999:44) akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:

1. Single-member Constituancy

Yaitu satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik. Sistem ini dibagi berdasarkan jumlah kursi di DPR.

2. Multi-member Constituancy

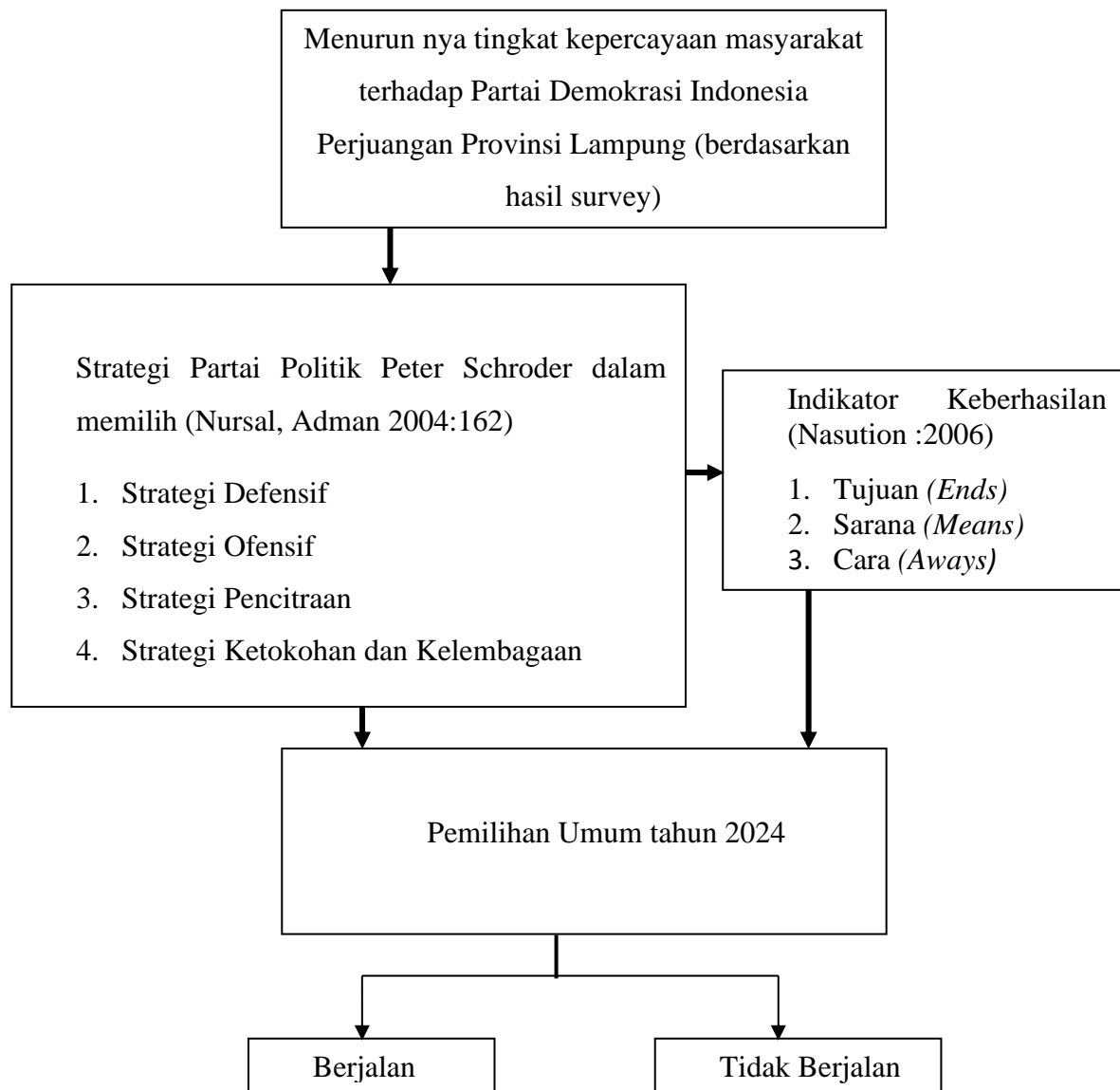
Yaitu satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya disebut sistem perwakilan berimbang atau sistem proposional.

Perbedaan pokok antara kedua sistem ini adalah cara menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik. Ada kelemahan dan kelebihan tersendiri dari kedua sistem ini, antara lain:

1. Kelebihan sistem distrik, antara lain wakil yang terpilih memiliki emosional dengan pemilihnya, sistem ini sederhana dan mudah diselenggarakan, sistem ini lebih mendorong kearah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu, dan lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain.
2. Kelemahan sistem distrik, antara lain hak-hak politik masyarakat diabaikan, ada kemungkinan wakil cenderung untuk lebih memerhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya dari pada kepentingan nasional, dan sistem ini kurang memperhatikan partai-partai kecil dan golongan minoritas apalagi golongan-golongan ini terpecah dalam berbagai distrik, dan sistem ini kurang respekensif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya.
3. Keuntungan sistem proporsional, antara lain hak politik masyarakat tidak diabaikan atau akan dihitung, dan sistem ini dianggap representatif karena jumlah kursi partai dalam parlemen dengan jumlah masyarakat yang diperoleh dalam pemilihan umum, sistem ini dianggap lebih demokratis dalam arti lebih egalitarian karena praktis tanpa ada distorsi yaitu kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kursi dalam parlemen tanpa suara yang hilang atau wosted.
4. Kelemahan sistem proporsional, antara lain munculnya partai-partai baru, pembagian keputusan di DPR akan sulit, wakil yang terpilih kemungkinan akan renggang ikatannya dengan konstituennya, dan sistem ini mempermudah fragmentasi partai.

2.1 Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Sumber: Diolah Peneliti, Tahun 2023.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan penyelidikan untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan atau untuk menjawab suatu permasalahan dengan menggunakan kriteria-kriteria ilmiah. Dengan demikian metode penelitian mencakup studi tentang cara-cara melakukan sebuah penelitian (Firdaus,2012:10). Penelitian terhadap Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Menggunakan tipe Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah Penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong,2014:5).

Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai jenis penilaian yang temuan-temuannya tidak di peroleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci (Eko,2015:8). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.

Menurut Arikunto (2010:5) metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang sudah ada sebelumnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Alasan Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah dalam menganalisis sebuah fenomena sangat membutuhkan dukungan data yang diperoleh dengan tehnik wawancara. Selanjutnya yaitu pengkajian mengenai konflik yang melibatkan eksekutif dan legislatif ini membutuhkan data lapangan yang sifatnya tidak statistik atau diperhitungkan dalam sistem angka. Dengan metode Penelitian kualitatif peneliti akan mendapatkan data yang sebenarnya mengenai Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian. Fokus penelitian sangat membantu seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, termasuk juga yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus memberikan batas dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga peneliti fokus memahami masalah yang menjadi tujuan penelitian.

Rancangan penelitian kualitatif, fokus kajian penelitian atau pokok soal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas (Burhan, 2012:41). Penelitian ialah fenomena yang menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi, dilihat dari perspektif ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini, fokus penelitian yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

Alasan memilih fokus penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti mengenai strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung dalam Pemilihan Umum tahun 2024, dimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PDI-Perjuangan menurun, sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dalam maksud mengetahui strategi yang diterapkan PDI-Perjuangan dalam pemilihan umum 2024 mendatang dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

3.3 Penentuan Informan

Memahami kancah penelitian yang lebih aman, peneliti berpikir untuk menemukan sumber data atau informan yang tepat (*key informan*). Selain itu peneliti juga memahami sumber data maupun kancah penelitian dengan *verstehen*. Dalam perspektif *fenomenologis*, *verstehen* sangat diperlukan peneliti didalam kancah penelitian. *Verstehen* adalah cara memahami situasi yang ditemui dilapangan (Anis dan Kandung, 2014:9).

Peneliti memfokuskan informan pada (*stackholder*) di lingkup Dewan Pimpinan Daerah PDI-Perjuangan Provinsi Lampung.

Menurut Sugiyono (2019) ketika melakukan penelitian kualitatif, teknik pengambilan sampel yang dilakukan untuk menetapkan sumber data informan yaitu teknik Purposive Sampling (Sugiyono, 2019). Teknik pengambilan informasi dari sumber data dilakukan dengan menentukan seseorang sebagai di anggap paling mengetahui informasi yang kita harapkan, bisa saja dia sebagai pimpinan sehingga lebih memudahkan peneliti dalam mendapatkan suatu informasi disebut dengan purposive sampling. Adapun daftar narasumber, yaitu:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Jabatan	Instansi	Nama
1	Sekretaris	DPD PDI-P Provinsi Lampung	Ir. H. Sutono, M.M
2	Waketu Bidang Politik	DPD PDI-P Provinsi Lampung	Sahlan Syukur, S.E
3	Waketu Bidang Ideologi dan Kaderisasi	DPD PDI-P Provinsi Lampung	H. Watoni Noerdin, S.H.,M.H
4	Waketu Bidang Pemenangan Pemilu	DPD PDI-P Provinsi Lampung	Ir. Endro S. Yahman, M.SC
5	Waketu Bidang Keanggotaan dan Organisasi	DPD PDI-P Provinsi Lampung	Dr. Yanuar Irawan, S.E, M.M

Sumber: Data Diolah Peneliti,2023.

Alasan peneliti memilih Informan di atas, dikarenakan peneliti membutuhkan suatu data yang valid dan bijak untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya. Pemilihan informan di lingkup Kantor Dewan Pimpinan Daerah PDI-Perjuangan Provinsi Lampung. Sehingga peneliti mempunyai data pendukung untuk peneliti sebagai bahan untuk menyelesaikan suatu penelitiannya. Yang mana terjadi hal yang sangat baik untuk di teliti karna akan menjadikan perbandingan dengan partai-partai lain nya.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data merupakan rangkaian fakta mentah atau peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran si penerima data tersebut, sehingga data harus diolah terlebih dahulu agar dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berupa angka, kata, karakter, suara, ataupun simbol yang dapat digunakan untuk dijadikan informasi. Menurut Ridwan (2008:69), sumber data dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang di peroleh secara langsung dari tangan pertama dilapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang dikutip dari sumber lain dalam bentuk dokumen seperti literatur, brosur dan karangan para ahli yang dianggap mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti serta diperoleh dari proses belajar mengajar dan beberapa dokumen berupa data penunjang peran dari fraksi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses Penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan

dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk mengumpulkan data dengan akurat mungkin mengenai variabel yang akan dikaji peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:266) antara lain: mengonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan lain lain (Moleong,2017:186).

Wawancara adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar. Wawancara bukanlah sebuah perangkat netral dalam memproduksi realitas. Dalam konteks ini berbagai jawaban diutarakan. Jadi, wawancara merupakan perangkat untuk memproduksi pemahaman situasional (*situated under standings*) yang bersumber dari episode-episode interaksional khusus. Metode ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik personal seorang Peneliti, termasuk ras, kelas sosial, kesukuan, dan gender (Norman dan Yvonna, 2009:495).

Wawancara juga diartikan sebagai bentuk komunikasi langsung antara Peneliti dan responden. Komunikasi terjadi secara langsung dalam bentuk tatap muka sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola Media yang melengkapi kata-kata verbal (Gulo,2002:119). Jadi wawancara diartikan sebagai proses interaksi dengan tujuan memperoleh informasi mengenai orang, organisasi, fenomena, dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dengan yang di wawancarai.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sudaryono, 2017:219).

Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti yang akurat dalam penelitian. Dokumentasi juga menjadi bahan acuan peneliti untuk melihat data-data berupa fenomena yang diabadikan dalam waktu yang belum begitu lama.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Tahap selanjutnya setelah data terkumpul, peneliti mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data menurut (Efendi dkk dalam Singarimbun,2008:240) terdiri dari:

1. Editing

Editing adalah kegiatan dalam Penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali daya yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, Peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilih serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penelitian. Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

2. Interpretasi Data

Pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya di interpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penelitian juga dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran juga ditentukan agar relevan dengan hasil penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan & Biklen dalam (Moleong, 2017:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memusatkan apa yang diceritakan kepada orang lain. Di pihak lain, analisis data kualitatif (Seiddel, 1998), prosesnya berjalan sebagai berikut:

Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber data nya tetap dapat di telusuri, Mengumpulkan, memilah milah, mengklasifikasikan, mensintesisikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya, berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Teknik analisis data bertujuan menyederhanakan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan di interpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memaparkan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata-kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan prosedur reduksi data, display (Penyajian data), dan menarik kesimpulan (verifikasi). Proses tersebut dijabarkan menurut (Milles dan Huberman, 1992:17), yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan final nya dapat ditarik dan diverifikasi.

Reduksi data memudahkan pemahaman atas data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum dan mengklarifikasikan sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti. Peneliti

mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian membuang data yang tidak sesuai dengan fokus Penelitian.

2. Display (Penyajian Data)

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data-data yang ada dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang disajikan disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan tertulis dilapangan. Misalnya, data yang mendukung Penelitian dari hasil yang ada dilapangan yang didapat dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Catatan-catatan penting dilapangan kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan lanjutan Peneliti pada penyajian data adalah data yang didapat disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu.

3. Verifikasi Data

Verifikasi merupakan tahapan terakhir dalam menganalisis data. Data diuji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. Data yang sudah di uji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari, arti, makna dan menjelaskan apa yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan Penelitian. Kegiatan Peneliti dalam verifikasi data adalah melakukan penggunaan Penelitian yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses display data.

Peneliti melakukan peninjauan terhadap data yang didapat dan dianalisis menggunakan teori yang Peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan Penelitian ini. Kemudian Peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil data yang telah direduksi dan ditampilkan. Proses pengolahan data dimulai dari pencatatan data lapangan yaitu data mentah, kemudian ditulis kembali dalam bentuk dan kategori data, setelah data

mengalami proses reduksi dan disesuaikan dengan fokus Penelitian. Data di analisis, diperiksa keabsahannya kemudian disimpulkan.

3.8 Teknik Validasi/Keabsahan Data

Agar dapat menentukan keabsahan data dalam Penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana di kemukakan Moleong (2014:324) yang dalam pemeriksaan menggunakan empat kriteria:

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Penetapan derajat kepercayaan menggunakan beberapa teknik pemeriksaan untuk memeriksa derajat kepercayaan Penelitian yaitu salah satunya melalui triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Denzin (dalam Patton, 2015:331) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam Penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan (Patton dalam Moleong, 2014:331) sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan peneliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Uraian nya harus mengungkapkan secara khusus agar dapat dipahami. Temuan tersebut merupakan penafsiran yang dilakukan dalam bentuk uraian rinci dengan segala macam pertanggung jawaban.

3. Kebergantungan (*Dependency*)

Merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam Penelitian nonkualitatif. Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Dalam Penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengandisepakati hasil Penelitian oleh banyak orang maka hasil Penelitian tidak lagi bersifat subjektif tapi sudah objektif.

Memeriksa kebenaran data menggunakan triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan data hasil wawancara kepada informan yang berbeda. Peneliti juga dapat melakukannya dengan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai macam sumber data, dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan dilakukan.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Strategi Pemenangan Partai

Definisi strategi pertama dikemukakan oleh Chandler (1962) strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut (Fredy Rangkuti, 2005:3) John A. Bryne mendefinisikan strategi sebagai sebuah pola yang mendasar dari sasaran yang berjalan dan yang direncanakan penyebaran sumber daya dan interaksi organisasi dengan pasar pesaing dan faktor-faktor lingkungan. Sementara itu Jack Trout dalam bukunya *Rout On Strategy* mengulas bagaimana bertahan hidup dalam dunia kompetitif, bagaimana membuat persepsi yang berbeda di benak konsumen, menjadi berbeda, mengenali kekuatan dan kelemahan pesaing, menjadi spesialisasi, kepemimpinan yang memberi arah dan memahami realita pasar dengan menjadi yang pertama dan lebih baik (Suyanto, 2007:16). Porter (1985) mengatakan bahwa strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing (Fredy Rangkuti, 2005:4)

Strategi secara umum adalah istilah yang sering diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu masalah. Istilah strategi diterapkan untuk berbagai lapisan masyarakat atau organisasi (level pelaksana sampai pimpinan puncak organisasi) Dari pengertian itu, strategi mempunyai lima ciri-ciri, sebagai berikut:

1. Pemusatan perhatian kepada kekuatan sebagai pendekatan strategis
2. Memusatkan perhatian kepada analisis dinamik, analisis gerak (operasional) dan analisis aksi (pelaksanaan)
3. Strategi memusatkan perhatian kepada tujuan yang ingin dicapai dan gerak untuk mencapai tujuan itu
4. Strategi memperhitungkan faktor-faktor waktu (sejarah: masa lampau, masa kini, masa depan dan faktor lingkungan)

5. Strategi berusaha mengidentifikasi masalah yang timbul dari peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung, kemudian mengadakan analisis tentang kemungkinan-kemungkinan dan memperhitungkan pilihan-pilihan serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan.

Strategi politik merupakan suatu analisis tentang bagaimana proses yang terjadi di dalam pemenangan dalam satu pertarungan politik oleh partai politik, atau secara langsung, oleh seorang calon pemilu presiden atau calon pimpinan daerah, yang menghendaki kekuasaan dan pengaruh sebesar-besarnya di tengah-tengah masyarakat sebagai konstituennya. Banyak faktor yang mempengaruhi proses ini, mulai dari kekuatan-kekuatan politik yang ada (institusi primordial baik yang bersifat keagamaan ataupun ke daerah), mesin-mesin politik yang ada (organisasi sosial politik/kelompok kepentingan baik partai politik, organisasi kepemudaan, dan media), proses pencitraan, sosialisasi politik, dan kampanye yang dilakukan, yang pada dasarnya hal ini adalah instrument dari serangkaian usaha pemenangan dalam pemilu.

Politik dan strategi adalah suatu mekanisme bagaimana seseorang atau pun kelompok dengan ide politik yang di pahami, mampu memenangkan suatu pertarungan politik disaat banyak orang yang berkepentingan menghendaki hal yang sama, ide politik yang akan menciptakan perbedaan antar masyarakat yang menjadi pendukung ide tersebut, dan dalam setiap keadaan pasti ada pihak yang di rugikan dan diuntungkan, karena hasil dari satu keputusan politik akan melahirkan perubahan ataupun kondisi yang sama disaat status quo yang memenangkan pertarungan itu, oleh karena itu setiap ide/pemikiran pasti memiliki pendukung dan penentang.

Dalam hal ini ide politik hanya akan dapat diwujudkan dalam satu pertarungan melawan penentang ide tersebut yang akan selalu bertumpu pada bagaimana kekuasaan dan pengaruh dapat diperoleh. Disaat yang sama banyak kelompok yang menghendaki hal yang sama, maka untuk mampu meraih kemenangan tentunya dalam pemilu dibutuhkanlah suatu perencanaan yang hati-hati, maka di sinilah letak substansi dari partai politik adalah organisasi artikular yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat dengan perhatian

untuk menguasai kekuasaan pemerintah dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda.

Berdasarkan perencanaan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) bahwa strategi yang baik dalam dua bidang. Dalam bidang pertama, perencanaan strategi membuat gambaran yang jelas mengenai arah yang hendak dituju (visi) dan apa yang menjadi tujuan, dan alasan eksistensi organisasi tersebut dalam gambaran ini mengembangkan tujuan yang merupakan hasil akhir dapat diukur, serta sejauh mana organisasi itu mendekati visi dan tujuan utamanya atau malah menjauhinya. Dalam bidang yang kedua, perencanaan strategi berusaha memperlihatkan realitas yang ada suatu organisasi.

Ada 2 hal yang harus diperhatikan, yang pertama yakni lingkup eksternal dimana wilayah yang pihak lain mempengaruhi atau dipengaruhi organisasi lain. Lingkup yang kedua adalah lingkup internal, yang terdiri dari atas sumber daya, kekuatan, berbagai kemungkinan serta tuntutan dari organisasi tersebut. Perencanaan strategi harus mampu melihat dan menilai kemungkinan dan ancaman yang terjadi dalam lingkup eksternal dan internalnya sehubungan dengan visi yang dimiliki, tugas serta tujuan akhir mereka. Setelah memiliki visi, dengan memiliki satu komitmen menggapai tujuan dengan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap lingkup yang ada, suatu organisasi harus mengembangkan pilihan strategis atau jalan alternatif guna menggapai tujuannya. Dengan memperbandingkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasinya serta peluang dan ancaman dari luar organisasinya.

Ada 4 kombinasi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Strategi kekuatan-kemungkinan artinya sejauh mana kekuatan dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan dan berbagai kemungkinan
2. Strategi kekuatan-ancaman artinya sejauh mana kekuatan dapat digunakan mengatasi ancaman, yang dapat menghalangi pencapaian tujuan

3. Strategi kelemahan-kemungkinan artinya sejauh mana kelemahan dapat diatasi untuk memperoleh keuntungan dari berbagai kemungkinan pengembangannya
4. Strategi kelemahan-kemungkinan artinya bagaimana kelemahan dapat diatasi, untuk mengatasi ancaman yang dapat menghalangi pencapaian tujuan.

Secara konseptual dipandang sebagai hal yang mampu menunjukkan logika yang diperlukan serta fleksibilitas yang dibutuhkan oleh perencanaan strategi untuk merespon suatu perubahan masyarakat. Di sisi lain perencanaan konseptual menerima faktor lingkungan sekitar sebagai besaran yang dapat diubah, karena tujuan dari strategi politik justru mengubah lingkungan sekitar, masyarakat, dan kerangka hukum. Perencanaan konseptual terdiri dari 10 langkah yang harus dilakukan.

(sumber:http://repository.usu.ac.id_strategi_partai_politik_memenangkan_pemilu_diakses_tanggal_25_juli_2014_pukul_19:35_wib) adalah sebagai berikut :

1. Perumusan Tugas

Perumusan tugas menjabarkan hal apa saja yang perlu direncanakan secara strategis, secara umum mencakup tiga elemen, yaitu:

- a. Tugas utama yaitu menjelaskan keadaan yang ingin dicapai melalui perencanaan strategis tersebut
- b. Alasan yaitu menjelaskan mengapa tujuan utama itu penting untuk dicapai
- c. Kerangka waktu yaitu kurun waktu yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan

2. Analisa Situasi dan Penilaian

Analisa situasi dan penilaian membahas, dan mengevaluasi fakta-fakta yang harus dikumpulkan, pemetaan kekuatan dan kelemahan, serta kemungkinan keberhasilan dalam mencapai tujuan (Freddy Rangkuti, 2005:10) ada 3 hal yang dilihat dalam hal ini yaitu:

- a. Pengumpulan fakta ada dua hal yaitu fakta-fakta internal dan fakta-fakta eksternal. Fakta-fakta internal adalah yang menyangkut organisasi sendiri, sedangkan fakta-fakta eksternal adalah menyangkut pesaing dan kondisi lingkungan dimana proses pemenangan itu terjadi, kedua fakta ini harus dipisahkan, untuk menghilangkan kerancuan atas sikap ataupun yang harus diambil di dalam melakukan strategi.
- b. Pembentukan kekuatan dan kelemahan artinya fakta yang diperoleh telah terkumpul akan diatur secara sistematis, dan akan dilihat dari kadar urgensinya dengan strategi yang akan dilakukan. Apabila suatu fakta yang dijumpai mendukung, maka itu akan menjadi kekuatan, sebaliknya apabila fakta yang di jumpai merintang, maka itu akan menjadi suatu kelemahan, sehingga dari fakta-fakta yang dijumpai akan berperan dalam perencanaan tindakan yang akan diambil dalam kondisi tertentu. Disisi lain dapat dipahami juga bahwa kekuatan dari pihak lain akan menjadi kelemahan bagi pihak sendiri, dan juga sebaliknya kelemahan pesaing dapat menjadi kekuatan bagi pihak sendiri.
- c. Analisa kekuatan dan kelemahan dalam hal ini, partai menempatkan kekuatan dan kelemahan yang diatur menjadi kadar kepentingan, sehingga selanjutnya yang harus dilakukan adalah bagaimana suatu kelemahan yang dimiliki harus dapat diminimalkan, memperbaiki diri sendiri tentu lebih mudah dari pada mempengaruhi kekuatan lawan yang menjadi rintangan bagi organisasi. Kemampuan menyerang pihak lawan tentu kembali kepada sarana yang dimiliki, termasuk sumber daya manusia. Dalam menganalisis kekuatan yang dimiliki dengan pihak lawan, dapat dilakukan berbagai hal seperti konsep yang dimiliki, segi kepemimpinan, sumber daya manusia yang dimiliki, kedisiplinan anggota partai, serta motivasi yang dimiliki. Dalam melihat siapa yang lebih memiliki peluang dalam meraih simpati masyarakat antara institusi sendiri dan lawan, maka hal yang dapat dilakukan adalah membandingkan partai mana yang lebih dikenal ataupun disenangi oleh masyarakat sebagai konstituen sesuai dengan trend politik yang ada, serta partai mana yang lebih memiliki pendekatan dengan identitas budaya masyarakat.

4.1.1 Perumusan Strategi

Menurut Ramlan Surbakti (1992:103) hal ini menjelaskan bagaimana partai merumuskan tentang konsep pemenangan yang akan dilakukan, ataupun ide-ide dasar partai dalam meraih simpati masyarakat, termasuk memetakan hal-hal yang dilakukan oleh lawan politiknya. Maka langkah awalnya partai politik harus merumuskan argument yang populis, dengan melihat wacana yang superior di tengah-tengah masyarakat yang kemudian menjadi komoditas partai dan akan di lempar kepada konstituen. Fokus terhadap suatu wacana yang populis amat diperlukan, sehingga menjadi pusat kekuatan, perumusan strategi secara menyeluruh juga mencakup variasi-variasi strategi yang dilakukan partai politik, sehingga gambaran dari satu tindakan dapat diduga bahkan bagaimana efektifitas suatu strategi dapat diukur agar mampu mengejutkan lawan.

4.2 Gambaran Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

4.2.1 Sejarah PDI-Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah partai politik di Indonesia. Sejarah PDIP dapat dirunut mulai dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Ir Sukarno pada 4 Juli 1927. PNI bergabung dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Partai gabungan tersebut kemudian dinamakan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973

Sejak awal terbentuk, konflik internal PDI terus terjadi dan diperparah dengan adanya intervensi dari pemerintah. Untuk mengatasi konflik tersebut, anak kedua dari Ir Sukarno, Megawati Sukarnoputri didukung untuk menjadi ketua umum (Ketum) PDI. Namun pemerintahan Suharto tidak menyetujui dukungan tersebut kemudian menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati

Sukarnoputri dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.

Larangan tersebut berbanding terbalik dengan keinginan peserta KLB, kemudian secara de facto Megawati Sukarnoputri dinobatkan sebagai ketum DPP PDI periode 1993-1998. Sehingga pada Musyawarah Nasional (Munas) 22-23 Desember 1993 di Jakarta, Megawati Sukarnoputri dikukuhkan sebagai Ketum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI secara de jure.

Konflik internal PDI terus terjadi hingga diadakan Kongres pada 22-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan. Pada 20 Juni 1996 para pendukung Megawati Sukarno Putri melakukan unjuk rasa hingga bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga kongres.

Kemudian pada 15 Juli 1996 pemerintah Suharto mengukuhkan Suryadi sebagai Ketum DPP PDI. Akhirnya pada 27 Juli 1996 pendukung Megawati Sukarnoputri menggelar mimbar demokrasi di halaman kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat. Kemudian muncul rombongan berkaus merah kubu Suryadi, kemudian terjadi bentrok dengan kubu Megawati Sukarnoputri. Peristiwa tersebut dikenal dengan kerusuhan dua puluh tujuh juli atau disingkat menjadi Peristiwa Kudatuli.

Setelah peristiwa tersebut, PDI di bawah pimpinan Suryadi hanya memperoleh 11 kursi DPR. Karena pemerintahan Suharto lengser pada reformasi 1998, PDI di bawah pimpinan Megawati Sukarnoputri semakin kuat, dan ditetapkan sebagai ketum DPP PDI periode 1998-2003 pada kongres ke-V di Denpasar, Bali.

Megawati Sukarnoputri kemudian mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada 1 Februari 1999 agar dapat mengikuti pemilu. Nama tersebut disahkan oleh notaris Rahmat Syamsul Rizal dan kemudian di deklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta. PDI Perjuangan (PDIP) melakukan Kongres I pada 27 Maret-1 April 2000

di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah. Kongres tersebut menghasilkan keputusan Megawati Sukarnoputri sebagai Ketum DPP PDIP periode 2000-2005. Pada Kongres IV PDIP di Bali pada 8-12 April 2015, Megawati Sukarno Putri kembali dikukuhkan sebagai Ketum PDIP periode 2015-2020.

4.2.2 Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Keadaan pada masa depan yang di inginkan oleh partai, dan oleh karna itu menjadi arah bagi perjuangan partai. Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI-Perjuangan adalah:

- a. Alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945
- b. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila)
- c. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualism dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Eka Sila)
- d. Wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat pasrtisipasi politik warga negara
- e. Wadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Misi

Misi partai adalah muatan hidup yang di emban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi partai, sebagaimana di amanatkan dalam pasal 7,8,9 dan 10 Anggaran Dasar Partai.

Tujuan Umum

- a. Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan Makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan social yang berdaulat di bidang politik, berdiri diatas kaki sendiri dibidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan Khusus

- a. Membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial
- b. Membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi
- c. Memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, social dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan, dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, Pendidikan, dan Kesehatan
- d. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

- e. Menggalang solidaritas dan membangun kerja sama internasional berdasarkan spirit Desa Sila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4.2.3 Tugas Partai

- a. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara
- c. Menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- d. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan deologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan Trisakti sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai
- e. Memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara
- f. Mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik
- g. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa
- h. Sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.

4.2.4 Keanggotaan

Pasal 1 Anggota Biasa Partai

1. Setiap Warga Negara Indonesia dapat mendaftarkan diri menjadi Anggota Biasa Partai.
2. Syarat untuk menjadi Anggota Biasa Partai:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah
 - b. Bersedia mematuhi Piagam Perjuangan, Mukadimah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai dan aturan-aturan partai lainnya
 - c. Bersedia mematuhi dan menegakkan Disiplin Partai
 - d. Bersedia mengikuti kegiatan Partai sesuai instruksi Partai
 - e. Bersedia menyatakan diri secara tertulis sebagai Anggota Biasa, dan menyampaikannya kepada Dewan Pimpinan Partai atau melalui Sistem Penerimaan Anggota yang disiapkan oleh DPP Partai
 - f. Bersedia memenuhi persyaratan administrasi persyaratan lainnya yang telah ditentukan oleh Partai.

Pasal 2 Anggota Partai

1. Setiap Anggota Biasa Partai wajib mengikuti pendidikan, pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan Partai di wilayahnya.
2. Selama masa pelatihan, pendidikan dan pembinaan, Partai memberikan materi ideologi Partai dan pendidikan politik dasar kepada Anggota Biasa berdasarkan kurikulum pendidikan dan pelatihan Partai.
3. Anggota biasa yang telah melalui tahap pendidikan, pelatihan dan pembinaan, mendapatkan rekomendasi dari DPC Partai, dan selanjutnya dilantik menjadi Anggota dan wajib mengucapkan sumpah atau janji sebagai Anggota Partai.

4. Pengesahan seseorang menjadi Anggota Partai diputuskan oleh DPC Partai.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai sumpah atau janji Anggota Partai diatur dalam Peraturan Partai.

Pasal 3

1. Setiap anggota biasa yang telah ditetapkan sebagai anggota Partai diberikan Kartu Tanda Anggota Partai oleh DPC Partai.
2. Bentuk, pengesahan, dan registrasi penomoran Kartu Tanda Anggota di atur dalam Peraturan Partai.
3. Pengurus Ranting, Pengurus Anak Cabang dan DPC Partai berkewajiban menghimpun, memverifikasi, dan mendata keanggotaan Partai di wilayahnya.
4. Data Keanggotaan Partai dilaporkan DPC Partai kepada DPP Partai untuk disimpan dan diarsipkan di Pusat Analisa dan Pengendali Situasi DPP Partai.

Pasal 4 Kader Partai

1. Kader Partai dipilih, ditetapkan dan diangkat dari anggota Partai yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Telah memiliki kemantapan ideologi, politik, dan kemampuan berorganisasi yang tinggi
 - b. Telah membuktikan kesetiaan dan ketaatan kepada Partai
 - c. Telah membuktikan kemampuannya menggerakkan dan/atau melaksanakan kegiatan dalam jajaran Partai dan/atau dalam masyarakat
 - d. Memiliki moral yang baik
 - e. Telah lulus pendidikan kader yang diselenggarakan oleh Partai.

4.2.5 Penugasan dalam Jabatan Politik dan Jabatan Publik

Pasal 8 Penugasan di Lembaga Eksekutif

1. Anggota Partai yang bertugas di Lembaga Eksekutif melaksanakan fungsi eksekutif pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan berpedoman kepada sikap politik, kebijakan dan Program Perjuangan Partai.
2. Anggota Partai yang terpilih sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Menteri dan/atau Wakil Menteri, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah wajib mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan berpedoman kepada sikap politik, kebijakan dan Program Perjuangan Partai.
3. Anggota Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh DPP Partai yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selama masa bakti DPP Partai.
4. Rapat DPP Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka koordinasi, sinkronisasi kebijakan, dan sinergi program pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Partai.
5. Anggota Partai yang bertugas sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden serta Menteri dan/atau Wakil Menteri dikoordinasikan secara khusus oleh Ketua Umum Partai.
6. Anggota Partai yang bertugas sebagai Kepala Daerah dan/ atau Wakil Kepala Daerah dikoordinasikan oleh DPP Partai melalui Bidang Pemerintahan.
7. Anggota Partai yang akan ditugaskan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Menteri dan/atau Wakil Menteri merupakan hak prerogatif Ketua Umum Partai.
8. Anggota Partai yang akan ditugaskan sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Partai.

Pasal 9 Penugasan di Lembaga Publik

1. Anggota Partai yang ditugaskan di Lembaga Publik wajib mensosialisasikan dan memperjuangkan sikap politik, kebijakan dan program perjuangan Partai menjadi program dari lembaga yang dipimpinnya.
2. Anggota Partai yang terpilih di lembaga Negara lain wajib mensukseskan tugas lembaga yang sesuai dan searah dengan kebijakan dan Program Partai.

4.3 Gambaran Umum DPD PDI-Perjuangan Provinsi Lampung

4.3.1 Logo Organisasi

Logo adalah bagian utama dari sebuah organisasi. Logo merupakan simbol yang menggambarkan suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Di balik sebuah logo, ada identitas serta filosofi dari organisasi

Gambar 4.1 Logo PDI-Perjuangan



Sumber: <https://id.m.wikipedia.org>

Filosofi Logo:

- a. Logo PDI Perjuangan berupa gambar banteng hitam bermoncong putih dengan latar merah di dalam lingkaran bergaris hitam dan putih.

- b. Warna dasar merah melambangkan berani mengambil resiko dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk rakyat.
- c. Mata merah dengan pandangan tajam melambangkan selalu waspada terhadap ancaman dalam berjuang.
- d. Moncong putih melambangkan dapat dipercaya dan berkomitmen dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran
- e. Lingkaran melambangkan tekad yang bulat dan perjuangan yang terus menerus tanpa terputus.

4.3.2 Profil DPD PDI-Perjuangan Provinsi Lampung

Pasca 27 Juli Tahun 1996 salah satu tokoh pendiri DPD PDI-Perjuangan Bapak Halamin Raim dan Ibu Sri Atmidah merupakan top central di Provinsi Lampung. Dalam pergerakannya semua berkumpul di rumah Bapak Halamin Raim dan mulai bergerak, setelah itu seluruh kader PDI-Perjuangan menyebar masuk ke PRD karna PRD adalah salah satu pergerakan untuk demokrasi, dan pada waktu itu nama PDI-Perjuangan masih Fron Demokrasi. Dari situlah tercetus membentuk posko gotong royong di setiap daerah yang ada di Provinsi Lampung. Setelah itu menggunakan asas gotong royong dan pada waktu itu kader PDI-Perjuangan bergotong royong. Pada tahun 1999 awal dan kemudian di sahkan tujuan tersebut. Di sahkan nya pada tahun 2008 tercetuslah satu tujuan satu perjuangan. Setelah itu mulai berkumpul tokoh-tokoh (Halamin Raim, Arifin Sukarno, Gatot Suranto, dan tim pembela PDI) di motori oleh Sapirawati, Setia Ningrum, Sukri untuk proses penggugatan di pengadilan. Di tahun 1999 semua sudah bulat PDI-Perjuangan pada waktu itu untuk ketuanya ibu Sri Atmidah

Pencapaian DPD PDI-Perjuangan Provinsi Lampung

1. Hasil Pemilu Tahun 2019

Tabel 4.4 Hasil Pemilu Tahun 2019 Provinsi Lampung

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Kursi
1	Partai Kebangkitan Bangsa	394.718	9
2	Partai Gerindra	529.921	11
3	PDI-Perjuangan	912.618	19
4	Partai Golkar	468.651	10
5	Partai NasDem	425.345	9
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	30.567	0
7	Partai Berkarya	85.075	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	391.730	9
9	Partai Persatuan Indonesia	132.785	0
10	Partai Persatuan Pembangunan	113.569	1
11	Partai Solidaritas Indonesia	48.125	0
12	Partai Amanat Nasional	325.999	7
13	Partai Hati Nurani Rakyat	35.229	0
14	Partai Demokrat	405.507	10
19	Partai Bulan Bintang	18.757	0
20	Partai Keadilan Persatuan Indonesia	6.971	0

<https://lampung.kpu.go.id/page/read/38/hasil-pemilihan-umum-tahun-2019#>

Sumber: Diolah peneliti, tahun 2023.

Daftar Nama Ketua DPD PDI-Perjuangan Provinsi Lampung

1. Drs. H. Sjachroedin ZP Periode 2007 s/d 2019
2. Sudin, S.E Periode 2019 s/d 2024

Struktur DPC PDI-Perjuangan Provinsi Lampung Masa Bakti 2019-2024

1. DPC PDI-Perjuangan Kota Metro

Ketua : Hj. Anna Morinda, S.E M.M

- Sekretaris : Ria Hartini, S.Sos., M.M
Bendahara : Basuki, S.Pd
2. DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Mesuji
Ketua : Budhi Condrowati, S.E
Sekretaris : Desta Ardiyanto, S.Pi., M.Ling
Bendahara : Femi Yusapila
3. DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Tanggamus
Ketua : Hi. Burhanudin Noer
Sekretaris : Hj. Dewi Handajani
Bendahara : H. AM. Syafi'i
4. DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pringsewu
Ketua : Palgunadi, S.TP
Sekretaris : Bambang Kurniawan
Bendahara : Rizky Raya Saputra, SH., MH. CLA
5. DPC PDI-Perjuangan Kota Bandar Lampung
Ketua : Hi. Wiyadi, S.P., M.M
Sekretaris : Melinda, S.Sos
Bendahara : Ahmad Jares Mogni, S.H
6. DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesawaran
Ketua : Ir. Endro Suswantoro, M.Sc
Sekretaris : Suprpto
Bendahara : Siti Uswatun Hasanah, S.H., M.PD.I
7. DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Lampung Barat
Ketua : Hi. Parosil Mabsus, S.PD
Sekretaris : Edi Novial, S.KOM
Bendahara : Sri Nurwijayanti, SS
8. DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Tulang Bawang
Ketua : Dr. Hj. Winarti, S.E., M.H
Sekretaris : Sopi'I, S.H., M.H
Bendahara : Ines Septia Saputri, S.H., M.H
9. DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah
Ketua : Loekman Djoyosoemarto, S.Sos., M.M
Sekretaris : Agus Hamid, S.Sos

- Bendahara : Wayan Eka Mahendra
- 10.DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Lampung Timur
- Ketua : Hi. Ali Johan Arif, S.E., M.Si
- Sekretaris : Sandi Yuda, S.H
- Bendahara : Supardi
- 11.DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Lampung Selatan
- Ketua : H. Nanang Ermanto
- Sekretaris : H. Syahril Alim, S.H., M.H
- Bendahara : Devi Rona Sari, S.Kom
- 12.DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Lampung Utara
- Ketua : Drs. Yose Rizal, M.H
- Sekretaris : Wirta Jaya Putra, S.Sos
- Bendahara : Ely Dahlia
- 13.DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pesisir Barat
- Ketua : Pieter, S.E
- Sekretaris : Sri Suyanti, S.E
- Bendahara : Mad Muhizar
- 14.DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Way Kanan
- Ketua : Drs. Danuri
- Sekretaris : Hi. Hamdani, S.E., M.M
- Bendahara : Komang Trawan
- 15.DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Tulang Bawang Barat
- Ketua : Ponco Nugroho, ST
- Sekretaris : Ahmad Muzaini, S.H
- Bendahara : Nadirsyah

Data Organisasi Badan Dan Sayap PDI Perjuangan Provinsi Lampung

- Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA)
- Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN)

- Badan Pendidikan Dan Pelatihan (BADIKLAT)
- Badan Pemenangan Pemilu (BP-PEMILU)
- Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat (BBHAR)
- Badan Kebudayaan Nasional (BKN)
- Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI)
- Banteng Muda Indonesia (BMI)
- Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GANTI)
- Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM)
- Taruna Merah Putih (TMP)

Susunan pengurus DPD PDI-Perjuangan Provinsi Lampung

Ketua	: Sudin
Wakabid Kehormatan Partai	: Marzuki
Wakabid Pemenangan Pemilu	: Endro S. Yahman
Wakabid Ideologi dan Kaderisasi	: Watoni Noerdin
Wakabid Keanggotaan dan Organisasi	: Yanuar Irawan
Wakabid Politik	: Sahlan Syukur
Wakabid Hukum, HAM dan Per-UU	: I Gede Sudiatmaja
Wakabid Perekonomian	: Tony Wijaya
Wakabid Kebudayaan	: May Sari Berty
Wakabid Penanggulangan Bencana	: Budhi S. Condowati
Wakabid Industri, T. Kerja dan J. Sosial	: Cik Raden
Wakabid Kesehatan, Perempuan dan Anak	: Eva Dwiana
Wakabid Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	: Dedy Wijaya Candra
Wakabid Koperasi dan UMKM	: Lesty Putri Utami

Wakabid Keagamaan, Keper Tuhan YME	: Habib Purnomo
Wakabid Eko Kreatif, Eko Digital	: D. Haris Sihotang
Wakabid Pangan, Pertanian, Ling. Hidup	: Hermanus Suprpto
Wakabid Kelautan dan Perikanan	: Zulfahmi H. Azhari
Sekretaris	: Sutono
Wasek Bidang Internal	: Apriliati
Wasek Bidang Program	: Siska
Bendahara	: Kostiana
Wakil Bendahara	: Ni Ketut Dewi Nadi

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung dalam Pemilihan Umum tahun 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Strategi defensif yang diterapkan PDI-Perjuangan dengan pemeliharaan yang baik, memerintahkan penugasan partai turun ke lapangan dengan program-program partai, lalu memintim dengan cara reses anggota dapil. Dalam mempertahankan mayoritas pasar PDI-Perjuangan juga melakukan dimedia massa dengan cara mengcounter isu-isu miring terhadap PDI-Perjuangan.
2. Strategi ofensif PDI-Perjuangan dengan trik menjual image yang baik di masyarakat yang daerahnya tidak memiliki basis PDI-Perjuangan dengan mempromosikan tentang PDI-Perjuangan. Pendekatan yang digunakan dengan pendekatan humanis yang turun kebawah menyapa masyarakat.
3. Strategi pencitraan yang dilakukan PDI-Perjuangan dengan membentuk cyber truck. Memberikan laporan kepada masyarakat terkait kerja politik yang telah dilakukan, PDI-Perjuangan sendiri juga bekerja sama dengan ormas-ormas islam seperti NU, MUI, dan Muhamadiyah
4. Strategi Ketokohan dan Kelembagaan yang diterapkan PDI-Perjuangan untuk partai ialah, dengan mengembangkan komunitas juang seperti Badan Sayap Partai, BAMUSI, Banteng Muda Indonesia. Selain itu, PDI-Perjuangan juga memperkuat kelembagaannya seperti (lembaga partai, badan partai, sayap partai, dan komunitas juang. PDI-Perjuangan juga melakukan perekrutan berjalan secara continue, dengan melakukan penjaringan dan penyaringan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat Peneliti berikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. **Strategi Defensif**
Untuk strategi defensif pemeliharaan yang dilakukan dengan tidak memberi program-program yang monoton sehingga masyarakat tradisional akan merasa jenuh terkait program yang itu-itu saja, perlu adanya perluasan program serta perlu menyambangi masyarakat tradisional dengan waktu-waktu yang sudah ditetapkan dan adanya kurun waktu menyambangi masyarakat tidak saat pemilu saja
2. **Strategi Ofensif**
Untuk strategi ofensif perlu adanya langkah-langkah yang dilakukan untuk mendapatkan massa basis baru dengan tidak hanya melakukan pendekatan-pendekatan saja, melakukan program-program yang di senangi didaerah non basis serta memberikan keyakinan bahwa PDI-Perjuangan bersama masyarakat dan bertujuan membuat kesejahteraan untuk masyarakat
3. **Strategi Pencitraan**
Untuk strategi pencitraan yang harus dilakukan tidak hanya dimedia sosial saja karna wong cilik lebih sibuk bekerja daripada bermain media sosial, citra yang diterapkan harus lebih sampai kemasyarakat
4. **Strategi Ketokohan dan Kelembagaan**
Untuk strategi ketokohan dan kelembagaan dalam perekrutan perlu adanya pemilihan yang melibatkan masyarakat dalam tahap perekrutan sehingga suara yang mewakili terdapat suara masyarakat dengan kandidat yang disenangi masyarakat sehingga masyarakat tidak kecewa dengan calon yang nantinya akan maju ketika pemilu

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Rahman, H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu
- Ali Moertopo, 1974. *Strategi Politik Nasional*. CSIS. Jakarta
- Anis, Kandung. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arend Liphart. 1995. *Sejarah Perkembangan Partai Politik di Indonesia*. Dian Rakyat. Jakarta
- Arifin A, 2006. *Pencitraan Dalam Politik (Strategi Pemenangan PEMILU Dalam Perspektif Komunikasi Politik)*. Jakarta: Pustaka Indonesia
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Budiarjo Miriam, 2003, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Kencana Perdana Media Group, Jakarta
- Burhan Bungin. 2012. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Eko D. Agustinova. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Politik*. Yogyakarta: Kalpulis
- Firdaus. (2012). *METODE PENELITIAN*. Tangerang: Jelajah Nusa
- Firmanzah, 2008. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning ideologi Politik di era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Firmanzah. 2008. *Marketing Politik: Antara Pemahaman Dan Realita*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gulo. W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. PT Gramedia Widiarsa Indonesia
- Moleong, J Lexy, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Refisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marrus. 2022. *Desain Penelitian Manajemen Strategi*. Jakarta: Rajawali Press
- Miles, M. B. dan Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Nasution. 2006. *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nimmo. 2005. *Komunikasi Politik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- Nursal, Adman. 2008. *Politik Marketing, Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye DPR, DPD, Presiden*. Bandung, CV Jaya Abadi.
- PDI Perjuangan. 2015. *Ketetapan Kongres IV PDI Perjuangan*.
- Prihatmoko Joko & Moesafa, 2008. *Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai*, Jakarta: PT. Tirta Jasa
- Ramlan Surbakti. 1992, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo
- Rangkuti Freddy. 2009. *Strategi Promosi Yang Kreatif Dan Analisis Kasus*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Ridwan. (2008). *Aplikasi Statistika dan Metode Penelitian untuk Administrasi dan Manajemen*. Bandung: Dewa Ruchi
- Schroder Peter, 2004. *Strategi Politik*. Jakarta: Fredrich Naumann Stifung
- Seiddel, 1998 di dalam Prof. Dr. Lexy J, (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: PT. Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 2008
- Sudaryono, Dr. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT. Raja Grafindo Husada
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2019. “*Memahami Penelitian Kualitatif*”. Bandung: Alfabeta
- Sulistyowati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Suyanto, M. 2007. *Marketing Strategy Top Brand Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset
- T. May Rudy. 2009. *Pengantar Ilmu Politik: Wawasan Pemikiran dan Kegunaan*. Bandung: Refika

Jurnal

- Abdul Hakim, Redi Panuju. *STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DPC PDI PERJUANGAN SURABAYA PADA PEMILU LEGISLATIF 2019*. (Jurnal. Universitas dr Soetomo Surabaya. 2019)
- Agus, M Hardjaja. 2002. *Stres Tanpa Distres: Seni Mengolah Stress*. Yogyakarta: Kanisius
- Ariel Kristianto Pura. *STRATEGI PEMENANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM CALON LEGISLATIF PARTAI GERINDRA DI DESA BUO KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMEHERA BARAT TAHUN 2019*. (Jurnal. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT. 2019)

- Chandler, Jr. 1962. *Strategy and Structure: Chapters in The History of The Industrial Enterprise*. Cambridge Mass: MIT Press
- Djojosoekarto, Agung and Utama Sandjaya (edisi). 2008. *Transformasi Demokratis Partai Politik di Indonesia*. Partnership for Governance Reform dan Strategic Transformation Institute.
- Friedrich, Carl J. *Constitutional Government and Democracy: Theory and Paractice in Europe and Americ*. Waltham, Mass. Blaisdell Publishing Company, 1967.
- H.R. Daeng Naja. 2005. *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*. Citra Aditya Bakti. Jakarta
- Jenifer Pesak, Daysi Posumah, Trilke Tulung. *STRATEGI PEMENANGAN PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA MANADO TAHUN 2019*. (Jurnal. FISIP UNSRAT 2019)
- John A. Byrne, D, (2012). *Social Psychology: Thirteenth Edition*. United States: Pearson Education. Inc.
- KPU. 2019. “Partai Politik Peserta Pemilu 2019.” Retrieved August 1, 2019 (<https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/verpol/skparpol>).
- Lincoln and Guba. (1985). *Qualitative Research*. Singapore: Mc. Graw Hill Book Co.
- Porter, E, M. 1985. *Competitive Advantage-Creating and Sustaining Superior Performance*, New York: Free Press
- Sagne dan Brigs, 1988:13 dalam Latuheru. *Sarana Dan Prasarana Penjas dan Olahraga*.
- Masrun. 1986. *Studi Mengenai Kemandirian Pada Penduduk di tiga Suku, Laporan Penelitian Kantor Menteri Negara dan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- Mintzberg, Henry, James Brian Quinn, dan Jhon Voyer, “*The Strategy Process*”. London: Prentic Hall International, Inc. 1995
- Neumann, Sigmund. 1963. *Modern Political Parties, Comprative Politics*. London: The Free Press of Glencoe
- Nofriadi, Effendi Hasan, Ubaidullah Helmi. *STRETAGI PEMENANGAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PADA PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN ACEH TENGAH*. (Jurnal. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. 2021)
- Norman K. dan Yvonna S. (edisi). 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Terj. Dariyanto dkk. Jogjakarta: Pustaka Belajar
- Nyoman Elang Bayu, Agus Satmoko Adi. *STRATEGI TIM DPC PDIP KOTA SURABAYA DALAM PEMENANGAN PASANGAN RISMA-WHISNU*

PADA PILKADA KOTA SURABAYA TAHUN 2015. (Jurnal. Universitas Negeri Surabaya. 2016)

Prahalad, G. H. C. (1989). *Strategic Inten.* Havard Business Review, 700(November), 96-116. <https://doi.org/10.1225/R0507N>

Sitompul, Chudry. 2008. “*Konflik Internal Partai Sebagai Salah Satu Penyebab Kompleksitas Sistem Multi Partai Di Indonesia.*” Jurnal Legislasi Indonesia 5(102-129). Retrieved October 16, 2019 (<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/437-konflik-internal-partai-sebagai-salah-satu-penyebab-kompleksitas-sistem-multi-partai-di-indonesia.html>).

Suryo Untoro. *Idiologi Demokrasi Moral Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila.* STIE Indonesia. Malang

Umar, Husein, 2002. *Strategic Manajemen in Action.* PT. Gramedia Pustaka

Wibowo. (2017). *Manajemen Kinerja.* Edisi Keempat. Jakarta: Rajawali Pers

Wibowo. (2017). *Perilaku Dalam Organisasi.* Edisi 1-2. Jakarta: Rajawali Pers

Skripsi/Tesis/Disertasi

Afri Andi. 2021. *STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN UNTUK MEMPEROLEH SUARA PEMILU LEGISLATIF 2019 PEKANBARU.* SKRIPSI. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Dendy Irwansyah. 2021. *STRATEGI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) DALAM PEMENANGAN PILKADA 2017 (Studi di DPC PDIP Kabupaten Brebes).* SKRIPSI. Tegal: Universitas Pancasakti Tegal.

Harjuno Saputro. 2021. *POLA REKRUTMEN PDI-PERJUANGAN DALAM KANDIDASI CALON KEPALA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020.* SKRIPSI. Lampung: Universitas Lampung.

Fitri Hidayati. 2017. *STRATEGI POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PADA PEMILU LEGISLATIF PERIODE 2004-2014 DI KABUPATEN SUKOHARJO.* SKRIPSI. Malang: Universitas Brawijaya Malang.

Samad Umarama, S.Ag. 2009. *STRATEGI PEMENANGAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PADA PEMILU LEGISLATIF 2004 (Studi di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara).* TESIS. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Vikri Wanto. 2016. *STRATEGI PEMENANGAN PARTAI POLITIK GOLKAR PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN NAGAN RAYA.* SKRIPSI. Aceh: Universitas Teuku Umar Aceh.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 ayat 1

Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Internet

<https://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/06/LAMPUNG.jpg>

[http://repository.usu.ac.id_strategi_partai_politik_memenangkan_pemilu_diakses_tanggal_25_juli_2014_pukul_19:35_wib\)](http://repository.usu.ac.id_strategi_partai_politik_memenangkan_pemilu_diakses_tanggal_25_juli_2014_pukul_19:35_wib)

<https://id.m.wikipedia.org>

https://lampung.kpu.go.id/page/read/38/hasil-pemilihan-umum-tahun_2019#

[https://nasional.kompas.com/read/2022/9/22/survei-charta-politika\)](https://nasional.kompas.com/read/2022/9/22/survei-charta-politika)

[https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/verpol/skparpol\)](https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/verpol/skparpol)

Litbang Kompas:3/11/2022